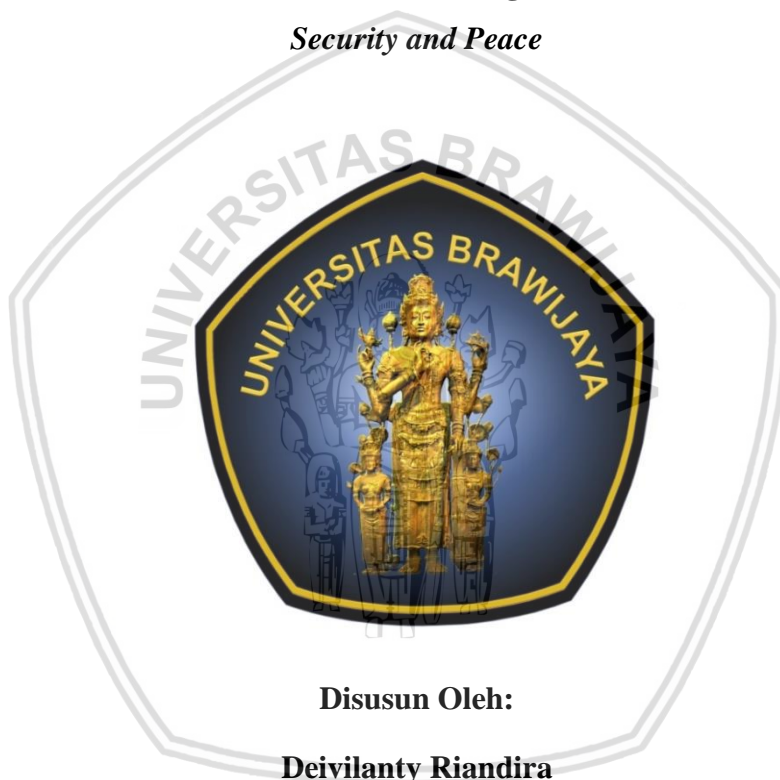


**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
TIONGKOK MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI KEPADA
KOREA SELATAN TAHUN 2016-2017**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan *Internasional
Security and Peace***



Disusun Oleh:

Deivilanty Riandira

NIM. 125120407121041

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018



LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TIONGKOK MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI KEPADA KOREA SELATAN TAHUN 2016-2017

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Deivilanty Riandira
NIM. 125120407121041

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Firstyarinda Valentina Indraswari., S.Sos., M.Si
NIK. 2013098602142001

Reza Triarda., S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hubungan
Internasional

Aswin Ariyanto Azis., S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201121001

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TIONGKOK MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI KEPADA KOREA SELATAN TAHUN 2016-2017

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Deivilanty Riandira
NIM. 125120407121041

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 19 Juli 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Yustika Citra Mahendra., S.Sos., MA.
NIP. 198408232015041001

Wishnu Mahendra W., S.IP., M.SI
NIK. 20170896281001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Firstyarinda Valentina Indraswari., S.Sos., M.Si
NIK. 2013098602142001

Reza Triarda., S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Deivilanty Riandira

NIM : 125120407121041

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas : Universitas Brawijaya

Judul : Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tiongkok Memberikan
Sanksi Ekonomi Kepada Korea Selatan tahun 2016-2017

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah benar-benar karya saya sendiri, hal-hal lain yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda citasi dan tertera dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari skripsi saya ini tidak sesuai dengan pernyataan yang saya buat di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya terima dari skripsi tersebut.

Malang, 11 Juli 2018

Yang menyatakan,

Deivilanty Riandira

NIM. 125120407121041

KATA PENGANTAR

“I thought to give up. Then i give up the thought.”

Puji Syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Esa karena berkat dan perlindungan-Nya yang berlimpah sehingga saya masih mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa, sebagai anak, dan sebagai teman di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial ini. Entah berapa kali saya berpikir untuk menyerah, tapi dengan berkat dan kesempatan yang tak terhingga dari Tuhan akhirnya terselesaikanlah kewajiban ini. Skripsi ini menjadi tanda berakhirnya *chapter* kehidupan saya sebagai pelajar, dan membuktikan bahwa saya siap untuk melanjutkan *chapter* kehidupan selanjutnya. Namun hal ini tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan pihak-pihak disekitar penulis, selama proses pengerjaan yang panjang dalam kehidupan perkuliahan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada pihak-pihak tersebut, antara lain:

1. Kepada **orang tua**, G. Rian Wibowo dan Y. Yayuk Shelaning Indira yang selalu senantiasa memberikan dukungan moral dan material, serta dukungan jiwa dan raga. Terimakasih untuk semangat, omelan, tekanan, dan doa yang selalu menemani saya selama ini. Kepada saudara seibu **Yohanes Deo Tobit Prabowo**, yang telah memberikan dukungan dengan caranya sendiri secara tak kasatmata.
2. Dosen pembimbing I, **Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari**, yang telah memberikan tuntunan arahan dalam materi pengerjaan dan telah memberikan semangat dikala saya mulai putus asa. Terimakasih atas ilmu

yang telah anda berikan secara teknis maupun substansi. Terimakasih pula telah menerima saya sebagai murid.

3. Dosen pembimbing II, **Bapak Reza Triarda**, yang telah memberikan masukan dan brainstorming yang sangat berguna bagi penulis selama masa pengerjaan skripsi ini. Maaf jika saya terlalu keukeuh pada pemikiran dan argumentasi saya sendiri.
4. Kepada seluruh **dosen HI beserta staff**, yang telah membantu secara akademik maupun administrasi selama masa perkuliahan. Kepada Ibu **Karina Putri Indrasari**, yang masih memberikan *support* tidak terduga kepada saya. Terimakasih masih peduli kepada saya walaupun sudah bukan anak bimbingannya lagi.
5. Kepada HI INGGRIS 2012: **Adel, Agam, Almero, Angga, Ayin, Aji, Andy, Aloy, Amri, Bayu, Bena, Bang Adri, Dhani, Dayana, Demas, Brina, David, Enda, Edar, Edo, Faizal, Gita, Galang, Hadyan, Henggar, Ivan, Mas Ivan, Idham, Ima, Ian, Ido, Jodi, Lili, Mario, Mila, Komet, Oko, Rio, Sena, Sheryltha, Vano, Wirdan**. Yang telah menjadi teman sekelas selama 4 tahun, bersama-sama mengalami suka dan duka semasa kuliah, telah memberikan pengalaman paling berkesan selama belajar di bangku perkuliahan, telah menjadi salah satu kelas yang luar biasa semasa kehidupan persekolahan. Saya akan selalu mendoakan kalian semua sehat dan sukses selalu.
6. **Kepada Panitia Pernikahan Aqlima/ Liang Ular:** Aqlima Naili Salsabila, Adelina Eka Sagita, Antasena Adi Perdana, Enda Eunike, Adam

Mahendra, Faizal Muqoddas, Fildza Meutia, Indi Aulia Rahman, Kharisma Ridho, Ni Nyoman Komet Kartika Pertiwi Nurul Rohmah, Mutia Nur Alifa. Telah mendukung, mengingatkan, dan menghibur selama masa proses pengerjaan. Terimakasih pula telah melibatkan saya dalam pertemanan ini, dan telah membuat kehidupan perkuliahan saya lebih berguna, bermanfaat dan berwarna.

7. Kepada teman pembimbing dan pemberi ide: Terimakasih kepada **Ni Nyoman Komet Kartika Pertiwi** yang telah mendukung saya, menemani saya membangun awal pengerjaan skripsi ini. Walaupun pada akhirnya pergi duluan, tapi tetap memonitor dan memberikan semangat dari jauh, saya sangat mengapresiasinya. Terimakasih pula telah menjadi teman kosan yang loyal dan peduli kepada saya. Terimakasih kepada **Antasena Adi Perdana** yang telah membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi dosen pembimbing *unofficial* saya selama pengerjaan skripsi, yang telah memberikan masukan mengenai kasus, teori dan alur pemikiran. Terimakasih untuk selalu mengingatkan saya terhadap pengerjaan skripsi ini. Dan terimakasih kepada **Enda Eunike**, yang telah memberikan ide untuk membahas kasus ini. Mungkin jika bukan karena ide anda skripsi ini tidak akan ada. Terimakasih yang sangat mendalam.
8. Terimakasih pula kepada **Fitria Rachmaningrum**, yang telah menjadi teman kosan dan teman curhat saya mengenai perkuliahan maupun mengenai hidup. Terimakasih atas dukungan dan desakannya untuk segera menyelesaikan kewajiban ini, terimakasih pula untuk selalu memberikan hiburan dikala kesuntukan melanda.

9. Terimakasih kepada Winner, Bigbang, Ikon, BtoB, 13 Reasons Why, drama-drama Korea, Runningman, 1 night 2 days, seluruh staff Tvn, SBS, KBS, MBC, JTBC, Youtube, dan seluruh platform hiburan yang telah menyediakan tontonan yang sangat menghibur. Terutama kepada Winner dengan anggotanya: Kang Seungyeon, Kim Jinwoo, Lee Seunghoon, dan Song Mino. Terimakasih selalu memberikan musik dan tingkah laku yang luar biasa, selalu menampilkan canda tawa serta haru yang selalu menemani saya selama menjalani kehidupan perkuliahan ini. Saya selalu mendoakan kalian sehat, bahagia, sukses dan langgeng supaya dapat terus memberikan penghiburan kepada penggemar-penggemar anda sekalian.
10. Terimakasih pula kepada semua pihak yang belum dapat disebutkan. Terimakasih atas dukungan, masukan, apresiasi, kritik, pandangan sebelah mata hingga cacimakiannya. Karena perhatian anda sekalian saya bisa sampai pada tahap ini, karena segala sesuatu yang anda berikan kepada saya, semuanya membawa dan akan berpengaruh bagi kehidupan saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak termakasih. ☺

“Lo boleh jadi apapun yang lo mau. Tapi paling engga, lulus kuliah. Karena buat mereka tuh suatu kebanggaan.” – Raditya Dika.

ABSTRAK

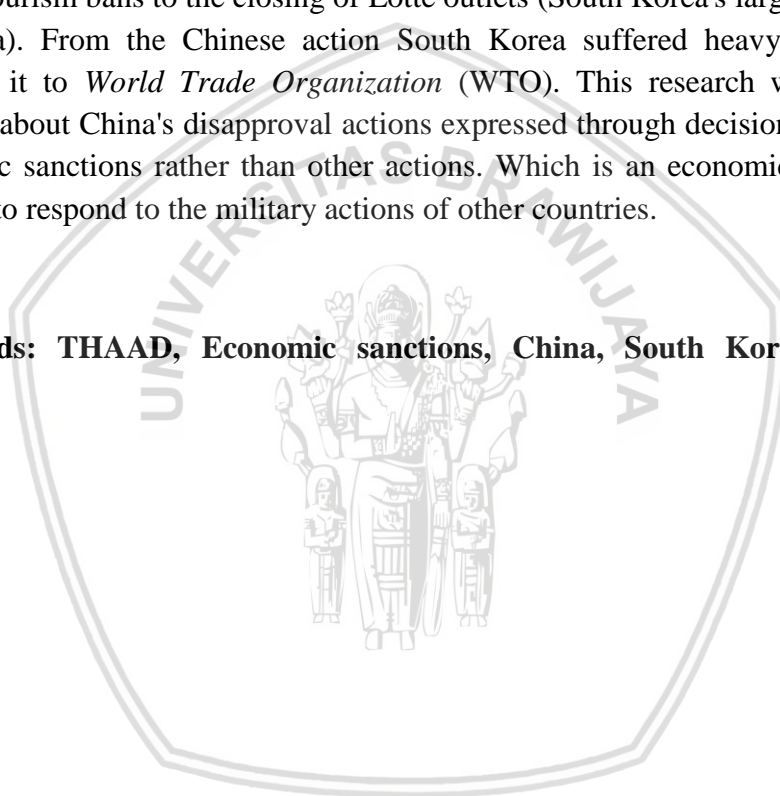
Pada tahun 2016 Korea Selatan mengumumkan secara resmi bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan sistem pertahanan *Terminal High Altitude Air Defence* (THAAD) yang di-claim oleh Korsel untuk melindungi pertahanan dari serangan nuklir Korea Utara. Berbagai respon berdatangan dari dalam negeri maupun luar negeri. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang memberikan respon ketidaksetujuan terhadap pengembangan sistem tersebut di wilayah regional Asia Timur. Ketidak-setujuan Tiongkok terhadap pengembangan sistem tersebut ditunjukkan melalui tindakan sanksi ekonomi. Pada tahun 2016, Tiongkok secara tidak langsung memberikan sanksi ekonomi dengan menghambat perdagangan Korsel ke wilayah Tiongkok di berbagai bidang ekonomi. Mulai dari bidang entertainment, perdagangan kosmetik, otomotif, barang elektronik, pelarangan wisata hingga penutupan gerai Lotte (waralaba terbesar di Tiongkok milik Korsel). Dari tindakan Tiongkok tersebut Korsel mengalami kerugian besar, dan melaporkannya kepada *World Trade Organization* (WTO). Penelitian ini akan mencari jawaban mengenai tindakan ketidaksetujuan Tiongkok yang diutarakan melalui keputusan memberikan sanksi ekonomi ketimbang tindakan yang lain. Yang merupakan tindakan ekonomi suatu negara untuk merespon tindakan militer negara lain.

Kata kunci: THAAD, sanksi ekonomi, Tiongkok, Korea Selatan, keputusan luar negeri.

ABSTRACT

In 2016 South Korea announced officially working with the United States to develop a defense system called *Terminal High Altitude Air Defence* (THAAD) which South Korea intended to protect the defense from North Korea's nuclear attack. Various responses came from domestic and abroad. China is the only country to respond to disagreement of the development of the THAAD system in the East Asia region. China's disagreement towards the development of the system is shown through economic sanctions. In 2016, China indirectly provided economic sanctions by inhibiting South Korean trade to China in various economic fields. Ranging from entertainment, cosmetics, automotive, electronic goods, tourism bans to the closing of Lotte outlets (South Korea's largest franchise in China). From the Chinese action South Korea suffered heavy losses, and reported it to *World Trade Organization* (WTO). This research will look for answers about China's disapproval actions expressed through decisions to provide economic sanctions rather than other actions. Which is an economic action of a country to respond to the military actions of other countries.

Keywords: THAAD, Economic sanctions, China, South Korea, Foreign Policy.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Studi Terdahulu	10
2.2 Kerangka Konseptual	14
2.3 Definisi Konseptual.....	16
2.3.1 <i>Decision maker</i>	16
2.3.2 <i>Domestic Politics</i>	17
2.3.3 <i>Economy and military factors</i>	18
2.3.3.5 Ketakstabilan Internal dan Kemampuan Militer.....	24
2.3.4 <i>International Context</i>	25
2.4 Operasionalisasi Konsep	27
2.5 Argumen Utama	35
2.6 Alur Pemikiran	36
BAB III: METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38

3.4 Teknik Analisis Data	38
3.5 Sistematika Penulisan	39
BAB IV: GAMBARAN UMUM	41
4.1 Bentuk Sanksi Ekonomi Tiongkok	41
4.2 Implementasi Sanksi Ekonomi Tiongkok kepada Korsel Pada Tahun 2016-2017	45
BAB V: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SANKSI EKONOMI TIONGKOK KEPADA KOREA SELATAN PADA TAHUN 2016-2017	51
5.1 <i>Decision maker</i>	51
5.1.1 Pengaruh Seorang Pengaruh Keputusan	52
5.2 <i>Economy and Military Factors</i>	56
5.2.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa	56
5.2.3 Kebergantungan Pada Perdagangan dan Finansial Internasional	61
5.2.4 Tingkat kebergantungan pada sumber-sumber militer luar negeri.	69
5.2.5 Ketidakstabilan Internal dan Kemampuan Militer	73
5.3 International Context	77
5.3.1 Keterkaitan geografis	78
5.3.2 Hubungan ekonomi	82
5.3.3 Hubungan Politik	87
BAB VI: PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran dan Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR SINGKATAN

Korsel	: Korea Selatan
Korut	: Korea Utara
AS	: Amerika Serikat
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i> (Pendapatan Domestik Bruto)
GNP	: <i>Gross National Product</i> (Product nasional Bruto)
GNI	: <i>Gross National Income</i> (Pendapatan nasional)
THAAD	: <i>Terminal High Altitude Air Defence</i>
CCTV	: <i>China Central Television</i>
CCP	: <i>Chinese Communist Party</i>
CNY	: <i>Chinese Yuan</i>
CPLA	: <i>Chinese People's Liberation Army</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Larangan Perjalanan oleh Pemerintah Tiongkok ke Jeju tahun 2015 .	50
Gambar 2: Perbandingan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan AS	58
Gambar 3: Grafik GNP Tiongkok tahun 2008-2016.....	59
Gambar 4: tingkat pengangguran Tiongkok pada tahun 2010-2015.....	59
Gambar 5: Hubungan Perdagangan Tiongkok, Jepang, dan Korsel Tahun 1995-2015.....	62
Gambar 6: Fluktuasi Perdagangan Tiongkok Mulai Tahun 2006-2016 (dalam satuan miliar USD).....	63
Gambar 7: Trend Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok tahun 2003-2016 (dalam miliar USD).....	66
Gambar 8: Perbandingan Jumlah Kapasitas Militer Tiongkok dan AS tahun 2015	67
Gambar 9: Grafik Trend Internasional Transfer Senjata Tahun 1950-2015 (dalam miliar volume).....	70
Gambar 10: Jumlah Personil PLA dalam Masing-Masing Angkatan	74
Gambar 11: gambar Peta Tiongkok	79
Gambar 12: estimasi jangkauan THAAD	79
Gambar 13: Ranking Tiongkok pada <i>Trade Openness index</i>	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Operasionalisasi Konsep	34
Tabel 2: Peringkat Negara Ekspor Senjata Beserta Negara pemasok dan Negara Penerima Tahun 2015 (dalam satuan desimal)	71
Tabel 3: Peringkat Negara Impor Senjata Beserta Negara Pemasok dan Negara Penerima Tahun 2015 (dalam satuan desimal)	71
Tabel 4: ekspor – impor Tiongkok tahun 2015	84
Tabel 5: ekspor – impor Korea Selatan tahun 2015	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antar negara sangatlah penting sebagai bentuk dari perkembangan masyarakat lokal bahkan internasional. Hubungan antar negara dalam terjalin mulai dari negara yang berdekatan hingga terletak disebelah kontinen. Hubungan antar negara menimbulkan saling ketergantungan antara hubungan politiknya, ekonomi, militer dan lain-lain. Hal ini juga terjadi pada Tiongkok dan Korsel.

Xi Jinping menduduki kursi kepresidenan pada tahun 2012, dan sejak saat itu strategi yang ditawarkan oleh pemerintahan tersebut adalah untuk lebih memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan Korea selatan (Korsel). Pertumbuhan sinergi antara Xi Jinping dan Park Geun-Hye dalam 3 tahun sejak dirinya menjabat merupakan hasil langsung dari keinginan kedua negara untuk meningkatkan hubungan.¹ Puncak dari hubungan kedua negara tersebut adalah penandatanganan *Free Trade Agreement* pada tahun 2015, yang digadang sebagai level tertinggi hubungan ekonomi kedua negara.²

Namun pada tahun 2016, hubungan kedua negara memanas ketika Korsel memutuskan untuk menandatangani kesepakatan pengembangan sistem *Terminal High Altitude Air Defence* (THAAD) dengan Amerika Serikat. Korsel mengklaim bahwa pengembangan tersebut dilakukannya untuk merespon pengembangan *ballistic missile* dan senjata pemusnah massal Korea Utara (Korut),

¹ Silvia Menegazzi. 2017. "china's foreign policy in Northeast Asia: implication for the Korean peninsula". IAI working paper| 03 January 2017.

² Ibid. Hlm: 1

yan gterus berlanjut dan mengakhawatirkan.³ Pemerintah Korsel menyatakan bahwa pengembangan sistem THAAD merupakan upaya dari pertahanan keamanan negaranya.

Pemerintah Korsel telah mengajukan proposal permohonan *support* sistem THAAD kepada AS sejak tahun 2013.⁴ Dan pada tahun itu, Tiongkok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan THAAD tersebut diwilayah Korsel maupun di wilayah regional Asia Timur. Sejak rencana Korsel untuk mengembangkan sistem THAAD pada tahun 2013, Tiongkok telah menyatakan ketidaksetujuannya sebanyak lebih dari 50 kali dalam berbagai kesempatan.⁵ Penolakan Tiongkok terhadap pengembangan THAAD di Korsel juga didukung oleh banyak pihak. Pengembangan dan penolakan tesebut kemudian menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Padahal semenjak pemerintahan kedua negara berganti, keduanya menjalin hubungan dengan baik.

Bentuk dari ketidaksetujuan tersebut ditunjukkan Tiongkok melalui sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan salah satu tindakan diplomasi koersif, yang sangat efektif bagi sebuah negara walaupun ada beberapa dari tindakan tersebut

³ Ankit Panda. "it's official: The United States and South Korea agree to deploy THAAD" [online]. Diakses melalui: <http://thediplomat.com/2016/07/its-official-the-united-states-and-south-korea-agree-to-deploy-thaad/>

⁴ Anonim. "S.Korea Requested Information on THAAD to Develop LSAM". diakses melalui: http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=103072

⁵ China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson's regular press conference on the following dates: Juni 8, 2017; Juni 7, 2017; Juni 1, 2017; Mei 31, 2017; Mei 2, 2017; April 26, 2017; April 17, 2017; April 14, 2017; April 5, 2017; Maret 29, 2017; Maret 27, 2017; Maret 22, 2017; Maret 20, 2017; Maret 17, 2017; Maret 10, 2017; Maret 7, 2017; Maret 6, 2017; Maret 3, 2017; Maret 2, 2017; Maret 1, 2017; Februari 28, 2017; Februari 27, 2017; Februari 8, 2017; Februari 7, 2017; Februari 6, 2017; Februari 3, 2017; Januari 25, 2017; Januari 13, 2017; Januari 11, 2017; Januari 6, 2017; Januari 5, 2017; Januari 3, 2017; Desember 22, 2016; Desember 16, 2017; Desember 9, 2016; Desember 1, 2016; November 28, 2016; November 21, 2016; November 16, 2016; November 4, 2016; September 30, 2016; September 13, 2016; September 7, 2016; September 5, 2016; September 2, 2016; Juli 13, 2016; Juli 11, 2016; and Juli 8, 2016. Transkrip dalam bahasa inggris diakses melalui: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/

yang gagal mencapai tujuannya.⁶ Sanksi ekonomi biasanya digunakan oleh sebuah negara kepada negara lain, untuk memaksa negara tujuannya tersebut menurut keinginan mereka.

Secara umum, sanksi ekonomi mempunyai 3 tipe utama, yaitu: *embargoes*, *financial sanctions* dan *boycott*.⁷ Embargo merupakan cara negara memberikan sanksi dengan membatasi tipe barang yang diekspor dari negara pemberi sanksi ke negara target.⁸ Yang kedua adalah *financial sanctions* yaitu dengan membatasi atau menanggukhan pinjaman internasional, dan/atau membekukan aset asing negara target.⁹ Dan yang ketiga adalah boikot yaitu memberi sanksi dengan membatasi impor satu atau lebih barang utama dari target.¹⁰

Dari Tipe umum tersebut Tiongkok memberlakukan *financial sanctions* kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Hal ini ditandai dengan adanya pelarangan penyebaran dan penyiaran konten *hallyu*, diskriminasi produk-produk Korsel yang tidak lulus uji, pelarangan perjalanan ke Korsel, dan pembekuan aset Korsel. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi Korsel, sehingga pada April 2017 Korsel melaporkan hal tersebut kepada *World Trade Organization* (WTO) atas tindakan yang diberikan oleh Tiongkok.¹¹

⁶ Moehammad Rosyidin dan Elpeni Fitrah. "Sanksi Ekonomi: Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional". Pustaka Ilmu, Purwokerto. 2016. Hlm: 1

⁷ Xianwen Chen dan Roberto Javier Gracia. 2016. "Economic sanctions and trade diplomacy: sanction-busting strategies, market distortion and efficacy of China's restrictions on Norwegian salmon imports". Norwegian Institute for Nature Research: Norwegia. Vol. 30 (1) 29-37.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ethan Meick dan Nargiza Salidjanova. 2017. "China's Responese to US-South Korea Missile Defense System Deployment and its Implications". Report from US-China Economic and Security Review Commission.

Menurut laporan dari *US-China Economic and Security Review Commission*, sejak Juli 2016 Tiongkok mulai memberikan hambatan ekonomi kepada produk Korsel untuk masuk ke Tiongkok. Menurut laporan tersebut produk Korsel yang dilarang meliputi bidang *entertainment*, yang banyak program televisi, konser, dan *event-event* yang melibatkan artis Korsel ditunda dan bahkan dibatalkan.¹² Kemudian dalam bidang *Consumer Products*, regulasi Tiongkok melarang penjualan dari produk Korsel yang meliputi teknologi udara, teknologi toilet, kosmetik, serta alat-alat keamanan, dalam hal ini penjualan merk dagang Hyundai dan Kia juga merosot tajam.¹³ Dalam laporan itu, disebutkan juga bahwa Tiongkok juga melarang warganya untuk bepergian ke Korsel, yang mana pemerintah menolak visa *Charter Flight* ke Korsel terhitung mulai maret 2017.¹⁴

Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa sulit untuk membuktikan keberadaan peraturan domestik yang mendukung adanya sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Tiongkok memiliki pola dan ciri-ciri tersendiri dalam melakukan sanksi ekonomi. Pola dan ciri-ciri tersebut adalah: (1) sanksi ekonomi Tiongkok ditunjukkan untuk menandakan ketidaksenangan pemerintah terhadap suatu peristiwa, (2) biasanya dilakukan secara sepihak, (3) tidak secara resmi dipublikasikan, (4) dilaksanakan tanpa undang-undang, dan (5) terbatas dalam hal aplikasi sektoral, ruang lingkup, dan durasi.¹⁵

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm: 7

¹⁴ Ibid, hlm: 7

¹⁵ Ibid.

Dari ciri-ciri tersebut kita dapat melihat bahwa Tiongkok sedang melakukan tindakan sanksi ekonomi kepada Korsel. Ketidaksetujuan Tiongkok terhadap pengembangan sistem THAAD di Korsel menunjukkan adanya ketidaksenangan Tiongkok terhadap tindakan Korsel. Walaupun pemerintah Korsel telah menjelaskan bahwa pengembangan THAAD tidak ada kaitannya dengan keamanan Tiongkok, pemerintah Tiongkok tetap menyatakan ketidaksetujuannya.

Pemberlakuan secara sepihak terlihat pada pembekuan *asset* Lotte. Lotte merupakan perusahaan waralaba milik Korsel yang telah membuka gerai di Tiongkok sejak 20 tahun yang lalu. Pada awal 2017, pemerintah Tiongkok menutup 79 gerai dari total 99 gerai milik Lotte yang berada di *mainland* Tiongkok, yang berarti 80% gerai telah tutup.¹⁶ Hal tersebut terjadi setelah Lotte mendeklarasikan kesanggupannya untuk menyediakan lahan sebagai tempat pengembangan sistem THAAD.¹⁷ Namun demikian pemerintah Tiongkok berdalih menutup gerai Lotte karena perusahaan tersebut melanggar regulasi standar keamanan dan keselamatan kebakaran, sedangkan yang lainnya terpaksa ditutup karena adanya protes.¹⁸

Pemerintah Tiongkok tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa negaranya melakukan sanksi ekonomi kepada negara lain, yang dalam hal ini adalah Korsel. Namun demikian adanya tindakan pelarangan, pembatalan dan diskriminasi yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya menimbulkan kerugian kepada pihak penerima, yang dalam hal ini adalah Korsel. Cara informal yang demikian

¹⁶ Kenneth Tan. "80% of Lotte supermarkets in China have been forced to shut down in wake of THAAD backlash"[online]. Diakses melalui: http://shanghaiist.com/2017/03/21/lotte_closings-3/

¹⁷ Coco Feng and An Limin. 2017. "South Korea, China Businesses Can't Find Cover in Spat Over Missile Defense". Diakses melalui: <https://www.caixinglobal.com/2017-04-05/101074620.html>

¹⁸ Op,cit Kenneth Tan.

lebih disukai Tiongkok karena dianggap lebih fleksibel dan penyangkalan atas keberadaan tindakan yang dilakukannya.¹⁹ Penelitian yang membahas mengenai sanksi ekonomi Tiongkok juga mengalami kesulitan dengan tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mendukung tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut.

Tahun 2016-2017 bukanlah sanksi pertama yang diberikan Tiongkok kepada Korsel. Pada tahun 2000-2001 Tiongkok melarang impor *polyethylene*²⁰ dan telepon genggam yang berasal dari Korsel secara diam-diam. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok sebagai respon dari kenaikan tarif ekspor bawang Tiongkok ke Korsel, kenaikannya sebesar 315%.²¹ Konflik tersebut dikenal sebagai "*The Garlic war*".²² Dan pada tahun 2004-2005 terdapat konflik antara Tiongkok dan Korsel yang dikenal sebagai "*Kimchi War*". Sanksi ekonomi diberikan oleh Tiongkok kepada Korsel berupa pelarangan impor bahan-bahan pembuat makanan.²³ Tidak hanya pelarangan secara ekonomi, Tiongkok juga sempat melarang warganya untuk berpergian ke Korsel pada tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan wabah MERS yang sedang melanda Korsel.²⁴

¹⁹ Loc. cit Xianwen. Hlm: 37

²⁰ *Polyethylene* (PE) adalah bagian terpenting dari resin poliolefin. Yang merupakan bahan plastik yang paling banyak digunakan di dunia, yang digunakan untuk bungkus makanan, tas belanja, botol deterjen hingga tangki bahan bakar mobil. Bahan tersebut juga dapat diiris atau dipintal menjadi serat sintetis atau modifikasi untuk mengambil sifat elastis dari karet.

²¹ BBC News. "*Heads Roll in Korean Garlic war*"[online]. Diakses melalui: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2137866.stm>

²² Kim Young-su. "*garlic war with china flares up again*"[online]. Diakses melalui: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2001/04/12/2001041261182.html

²³ Anonim. "*the kimchi wars*"[online]. Diakses melalui: <https://www.economist.com/asia/2005/11/17/the-kimchi-wars>

²⁴ Joanna Lu. 2017. "*analysis: effect of the ban on China- South Korea groups tours*"[online]. Diakses melalui: <https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis-effects-of-the-ban-on-china-south-korea-gr-436747/>

Dari penjelasan latar belakang tersebut ada urgensi yang menarik minat penulis untuk meneliti penelitian ini. Tiongkok memberikan sanksi ekonomi sebagai bentuk dari ketidaksetujuannya terhadap THAAD yang dikembangkan di Korsel. dari sini kita bisa melihat bahwa Tiongkok menggunakan cara ekonomi untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab alasan Tiongkok lebih memilih tindakan ekonomi ketimbang tindakan lainnya, yang tentu saja bisa dijadikan alternatif. Oleh karena itu, keputusan yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut pasti dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambil keputusan. Untuk lebih memilih memberikan sanksi ekonomi ketimbang mengembangkan alat atau aliansi yang serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah **“faktor apa yang mempengaruhi keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintah Tiongkok untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017 terkait dengan pengembangan THAAD.
2. Untuk mengetahui pola politik luar negeri Tiongkok dalam mengambil keputusan luar negeri.

3. Untuk mengetahui hubungan antara Tiongkok dan Korea Selatan mengenai relasi politik dan ekonomi kedua negara tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan bagi ilmu pengetahuan, yang kemudian dibagi menjadi dua manfaat. Yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat dibidang hubungan internasional khususnya bagi pengetahuan mengenai alasan suatu negara mengeluarkan kebijakan dan pengetahuan mengenai pola politik luar negeri suatu negara.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi wawasan bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi penelitian mengenai kebijakan luar negeri dan yang menyangkut negara Tiongkok dan Korea Selatan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan inspirasi bagi penelitian selanjutnya dengan topik dan kajian yang serupa

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat membuka pengetahuan terkait kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Selatan, serta membuka pengetahuan mengenai sanksi ekonomi dari negara ke negara lain.

2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dan sebagai bahan acuan kepada penelitian yang hendak melakukan bahasan yang sama.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi terdahulu yang digunakan untuk memberikan patokan pada penelitian penulis mengenai kasus maupun mengenai teori yang penulis gunakan. Yang dalam hal ini penulis menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai bahan patokan. Masing-masing penelitian terdahulu atau studi terdahulu tersebut akan memberikan kontribusi pada penelitian penulis.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahrita yang berjudul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri terkait Uji Coba Nuklir Ketiga Korea Utara tahun 2013”, penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Universitas Airlangga tahun 2016.²⁵ Penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan yang mendorong Tiongkok mendukung resolusi DK PBB 2094 dan menerapkan sanksi pada Korut terkait uji coba nuklir ketiga yang dilakukannya.²⁶

Dalam penelitian tersebut Mahrita berangkat dengan dua urgensi, yang pertama, berangkat dari kedekatan hubungan Tiongkok dengan Korut, dan melalui logika ini Tiongkok dianggap memiliki pengaruh lebih besar dibanding negara lain untuk menekan Korut melakukan uji coba nuklir. Serta yang kedua, bahwa Tiongkok sedang berada dalam proses peningkatan dominasi pengaruh politik

²⁵ Mahrita. 2016. “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terkait Uji Coba Nuklir Ketiga Korea Utara tahun 2013”. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Vol. 5, no. 2.

²⁶ Ibid, hlm: 529

diranah global, sehingga penting baginya untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia.²⁷

Penelitian Mahrita tersebut menggunakan perangkat analisis identitas nasional yang dikemukakan oleh Valerie M. Hudson, yang menjelaskan bahwa hal yang didasari oleh proporsi bahwa kebijakan luar negeri merupakan refleksi dari budaya dan identitas nasional dalam negara tersebut.²⁸ Yang mana penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu citra diri dan citra strategis.

Mahrita mendapatkan tiga kesimpulan dari penelitian tersebut, menyebutkan alasan yang mendorong Tiongkok merubah kebijakan luar negerinya terkait uji coba nuklir Korut tahun 2013. Alasan yang pertama adalah untuk membentuk citra positif diranah global, yang dibuktikan melalui tiga indikator yaitu adanya aspirasi para elit politik untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari negara lain atas citra Tiongkok sebagai *responsible major power*.²⁹ Alasan kedua yang mendorong Tiongkok adalah adanya budaya strategis yang terinternalisasi, yang berarti bahwa pola perilaku Tiongkok dipengaruhi oleh budaya strategisnya dari hasil pengalaman masa lalu, nilai, norma, dan lensa perspektif.³⁰ Dan alasan yang terakhir adalah citra diri maupun budaya strategis merupakan dua atribut yang saling mendukung reaksi negara (*self*) terhadap perilaku negara lain (*others*), yang berarti kedua citra tersebut merupakan pedoman bagaimana negara berperilaku dalam sistem internasional.³¹

²⁷ Ibid, hlm: 530

²⁸ Ibid, hlm: 531

²⁹ Ibid, hlm: 541

³⁰ Ibid, hlm: 541

³¹ Ibid, hlm: 542

Studi yang dilakukan oleh Mahrita tersebut memberikan kontribusi pada penulis dalam memahami kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Mahrita merupakan penelitian dari sudut pandang negara Tiongkok dalam menentukan tindakannya terhadap sebuah situasi, bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, sama seperti penulis. Dalam hal ini penulis akan lebih memahami dan memberikan informasi mengenai pola perilaku Tiongkok dalam mengambil keputusan terhadap suatu negara. Sedangkan perbedaan yang diberikan dari penelitian ini adalah perangkat analisis yang digunakan, negara tujuan dari kebijakan Tiongkok, serta ruang lingkup.

Penelitian kedua yang penulis gunakan sebagai patokan dalam penelitian ini adalah sebuah working paper yang dilakukan oleh Iis Gindarsah, yang berjudul *“Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue, 2007-2008”*³². Dalam penelitian tersebut Iis Gindarsah menjelaskan mengenai perubahan arah kebijakan atau respon yang ditujukan kepada kasus nuklir Iran. Dalam penelitiannya tersebut ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perubahan dukungan dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Menurut Iis hal tersebut terjadi karena adanya oposisi dalam pemerintahan domestik. Bahwasannya Iis berpendapat pemerintah domestik memiliki peranan yang besar dalam perubahan kebijakan luar negeri. Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat kritik dari berbagai kelompok sosial-politik, yang sebagian besar merupakan masyarakat

³² Iis Gindarsah. 2012. *“Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue, 2007-2008”*. S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University: Singapore.

muslim, organisasi yang berbasis agama dan partai politik, sehingga menjadi pertimbangan yang dominan.

Dalam penelitian tersebut berpendapat bahwa dampak politik domestik dapat menentukan atau bahkan mengubah arah kebijakan luar negeri sebuah negara, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Indonesia terhadap nuklir Iran. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam perubahan arah kebijakan Indonesia, Iis Gindarsah, menyatakan bahwa aktor-aktor lain selain eksekutif dapat memberikan pendapatnya dan memiliki kemampuan untuk membujuk pembuat kebijakan³³. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa eksekutif pembuat kebijakan di Indonesia akan mempertimbangkan suara dari kelompok-kelompok sosial-politik dalam negeri untuk kemudian memutuskan sebuah kebijakan.

Dalam penelitian ini, Iis Gindarsah menekankan pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dengan menggunakan opini Coplin sebagai dasar penelitian. Penelitian Iis Gindarsah tidak menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri secara holistik, ia hanya menjelaskan proses pengambilan keputusan pada tingkatan *policy-influencer*, yang mana konteks internasional menjadi *pre-dominant* pada pengambilan kebijakan dan mencerminkan citra yang berbeda pada masing-masing aktor, yaitu kelompok-kelompok sosial-politik dan eksekutif. Aktor-aktor tersebut kemudian melakukan interaksi dan bargaining untuk saling mempengaruhi kebijakan luar negeri yang pada akhirnya akan diambil oleh eksekutif.

³³ Ibid.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan kontribusi untuk membantu dalam memahami penggunaan opini Coplin yang diaplikasikan kedalam sebuah kasus. Namun tidak seperti penelitian Iis Gindarsah yang hanya mencantumkan *policy-influencer* sebagai dasar penelitian, penulis akan menyertakan 2 faktor lain yang diutarakan oleh Coplin dalam penelitiannya. Kemudian penulis akan memberikan opini mengenai faktor predominant yang sesuai dengan kasus yang dipilih penulis sebagai obyek penelitian, yaitu konteks internasional dan kondisi ekonomi-militer negara³⁴.

2.2 Kerangka Konseptual

Kebijakan luar negeri merupakan suatu keputusan yang terdiri dari serangkaian pernyataan kebijakan dan tindakan, maupun yang langsung dan tidak langsung, yang mana mengekspresikan kepentingan negara terhadap suatu fenomena tertentu. Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan pada situasi tertentu, yang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain yang ditekan oleh beragam kondisi dan yang dipaksa untuk mengambil keputusan³⁵. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memutuskan kebijakan luar negeri, biasanya merupakan badan pemerintahan suatu negara, dan berbagai lapisan masyarakat juga turut mempengaruhi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

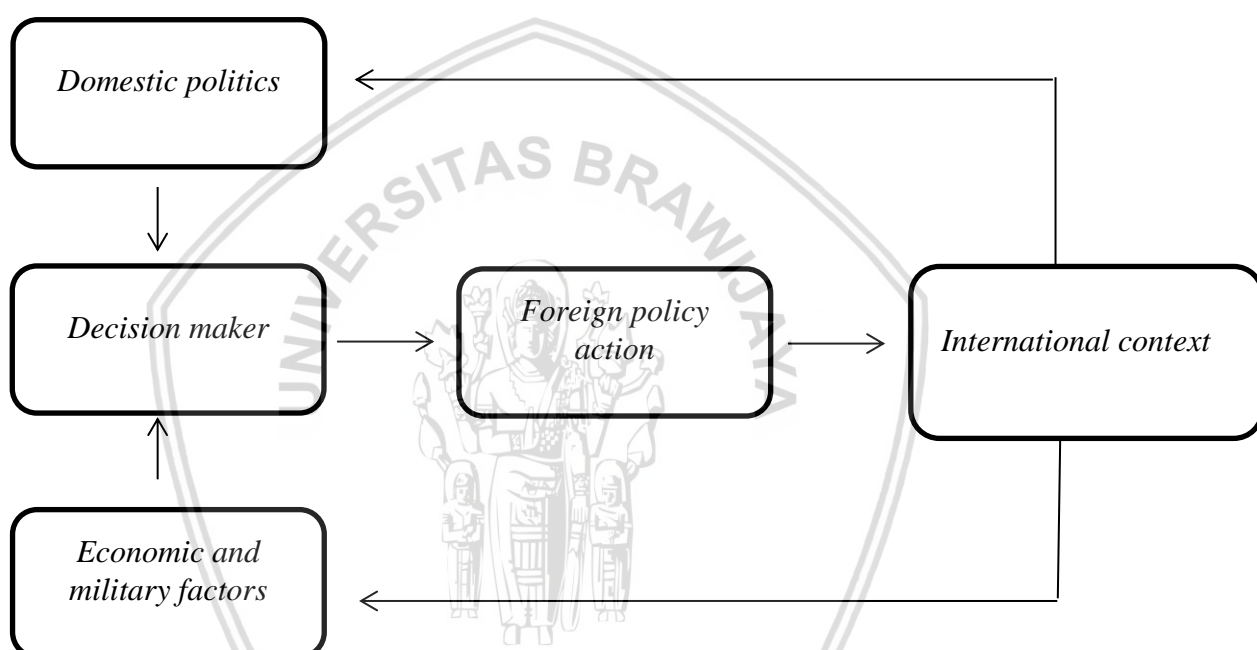
William D. Coplin menyebutkan bahwa pengambil keputusan politik luar negeri merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya

³⁴ Ibid, hlm: 15

³⁵ William D. Coplin. *"Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis Edisi kedua"*. (Bandung: CV Sinar Baru, 1992) Hlm: 32

dalam pergaulan dunia³⁶. Oleh karena itu jika kita mempertanyakan mengapa negara berperilaku demikian, maka kita harus mempertanyakan mengapa pemimpin negara tersebut membuat keputusan demikian³⁷. Bagan berikut akan menjelaskan faktor-faktor determinan yang digunakan untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri

Bagan 1 : Proses pengambilan keputusan politik luar negeri menurut William D. Coplin³⁸



Bagan tersebut menjelaskan alur pemikiran Coplin mengenai proses faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan politik luar negeri sebuah negara. yang jika dilihat dari alur bagan tersebut, tindakan politik luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh pengambilan keputusan, politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional negara tersebut. Dari faktor-faktor tersebut kemudian akan menghasilkan tindakan politik luar negeri sebuah negara dalam bentuk keputusan maupun kebijakan luar negeri.

³⁶ Ibid, hlm: 30

³⁷ Ibid, hlm: 30

³⁸ Ibid, hlm: 30

Bagan tersebut memperlihatkan bahwa konteks internasional memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu akan berpengaruh pada politik dalam negeri dan kondisi ekonomi- militer. Yang pada akhirnya kebijakan luar negeri yang di keluarkan akan berpengaruh pula pada kondisi interaksi negara dengan internasional.

Pada penelitian ini kemudian penulis akan menggunakan pemikiran dari William D. Coplin untuk mencari tahu mengapa Tiongkok kemudian mengeluarkan respon terhadap pengembangan THAAD di Korsel. Faktor yang dikemukakan oleh Coplin akan menjadi variabel, variabel - variabel tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk Tiongkok dalam mengambil keputusan. Maka dari itu variabel yang dominan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas keluarnya keputusan sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Korsel pada tahun 2016-2017.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 *Decision maker*

Pada bagian ini menjelaskan kondisi dalam negeri dimana dilihat dari pemimpinnya, bahwa pemimpin sebuah negara adalah manusia yang dapat mengambil keputusan secara rasional. Manusia sebagai pemecah masalah yang rasional untuk mengeksplorasi proses-proses intelektual yang terkait dengan penyusunan kebijakan luar negeri.³⁹ Dalam bagian ini coplin menitikberatkan bahwa penyebab terbentuknya keputusan luar negeri suatu negara berasal dari perilaku pengambil keputusan, yang mana adalah para pemimpin negaranya. Dalam hal ini pengambil keputusan tersebut juga dibentuk oleh lingkungannya,

³⁹ Ibid, hlm: 37

yang mana kita dapat menjelaskan keseluruhan politik luar negeri menurut perilaku seorang pemimpin yang khas.⁴⁰

Dalam variabel ini kita bisa menjelaskan bahwa suatu keputusan politik luar negeri suatu negara dapat disebabkan karena perilaku pemimpinnya yang khas. Dan keberadaan individu sebagai sesuatu hal yang penting untuk menjadi tolok ukur pengambilan keputusan politik luar negeri. Dan hal tersebut dilihat dari pada pemimpin negara, pemimpin negara menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara.

Adanya ciri khas dari seorang pemimpin negara menjadi indikator yang menjelaskan variabel *decision maker* sebagai penyebab dari lahirnya suatu keputusan politik luar negeri. Seorang pemimpin dihadapkan pada situasi-situasi tertentu serta memiliki tanggung jawab kepada orang lain untuk mengambil suatu keputusan. Variabel ini menjelaskan mengenai pengaruh pemimpin dalam keputusan politik luar negeri, karena kepemimpinan yang kuat tidak selamanya berarti menunjukkan keputusan politik luar negeri yang revolusioner.⁴¹

2.3.2 Domestic Politics

Dalam hal ini William D. Coplin menjelaskan pada fokus hubungan antara aktor pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi politik luar negeri mereka, Coplin menyebutnya *policy influencer* (yang mempengaruhi kebijakan).⁴² Hubungan antara aktor-aktor tersebut akan membentuk sistem, dan Coplin menyebutnya *policy influence system* (sistem kebijakan).

⁴⁰ Ibid, hlm: 169

⁴¹ Ibid, hlm: 169

⁴² Ibid, hlm: 74

Para aktor dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan atau *policy influencers* dibagi menjadi 4 macam, yaitu *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers*.⁴³ Dan interaksi antara *policy influencers* dan pengambil keputusan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan politik luar negeri suatu negara. Coplin berpendapat bahwa pengambil keputusan membutuhkan *policy influencer* sebagai sumber dukungan untuk rezim yang mereka bangun. Dukungan ini berbentuk bermacam-macam hal seperti kesetiaan angkatan bersenjata, dukungan finansial dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilu, dll. Dengan kata lain *policy influencer* dibutuhkan oleh pengambil keputusan untuk memperlancar jalan dalam rangka mendapat penghormatan dari negara lain dalam hal politik luar negeri.

Policy influencers tersebut akan beroperasi sesuai dengan sistem politik negara, yaitu antara sistem politik terbuka dan sistem politik tertutup.⁴⁴ Selain itu stabilitas dan instabilitas sistem politik berperan dalam keputusan politik luar negeri sebuah negara, bahwa pengambil keputusan mengambil konsekuensi-konsekuensi mempersatukan krisis eksternal dengan stabilitas dalam negeri, sehingga menjadi agresif di luar negeri. Dan perbedaan yang kedua terletak pada tujuan dan alat politik luar negerinya.⁴⁵

2.3.3 Economy and military factors

Menurut Coplin, kondisi ekonomi dan militer negara juga dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik luar negeri, sekalin kondisi politik dalam negeri. Dalam bukunya, Coplin juga mencantumkan sejarah

⁴³ Ibid, hlm: 81

⁴⁴ Ibid, hlm: 74

⁴⁵ Ibid, hlm: 170

perkembangan kondisi ekonomi dan militer negara, hal ini dimaksudkan agar kita dapat melihat sejauh mana sektor ekonomi dan militer saling berkaitan. Dalam penjelasan kondisi ekonomi dan militer oleh Coplin bahwa pengambilan keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuan dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya dan negaranya, yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer.⁴⁶

Pada masa perahilan antara abad ke -19 dan ke -20 dimana masa industrial sedang berkembang. Kebanyakan negara yang standar hidupnya tinggi adalah negara-negara yang tingkat industrialnya tinggi akan setara dengan angkatan bersenjata yang modern sangat mahal dan sangat bergantung pada peralatan canggih yang diproduksi melalui teknik-teknik industri, sehingga dapat dikatakan bahwa negara dengan tingkat industrialnya yang tinggi merupakan negara-negara yang militernya paling kuat.⁴⁷

Namun walaupun kondisi ekonomi dan militer berkaitan, Coplin memberikan sejumlah kriteria untuk mengukur kekuatan dan kelemahan ekonomi dan militer suatu negara. Sebuah negara yang memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik, hanya akan menghasilkan jenis barang dan jasa tertentu seperti produk pertanian dan bahan mentah.⁴⁸ Dan sebaliknya negara dengan ekonomi yang baik biasanya pasar internasional yang lebih stabil untuk memasarkan barang dan jasa mereka.⁴⁹ Pada dimensi kemampuan ekonomi Coplin mengukur dengan dua

⁴⁶ Ibid, hlm: 110

⁴⁷ Ibid, hlm: 114

⁴⁸ Ibid, hlm: 115

⁴⁹ Ibid, hlm: 115

repository.ub.ac.id

kriteria: (1) kapasitas produksi barang dan jasa, (2) kebergantungan pada perdagangan dan finansial negara pada internasional.⁵⁰

2.2.3.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa

Kapasitas produksi barang dan jasa merupakan salah satu yang menjadi tolok ukur kekuatan hingga kelemahan ekonomi suatu negara. Dalam tolok ukur ini kita dapat melihat sejauh mana kekayaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta kita juga dapat melihat pola-pola pertumbuhan suatu negara dari waktu ke waktu.⁵¹ Untuk mengukur nilai dari barang dan jasa yang diproduksi negara Coplin menyarankan melihatnya melalui *Gross National Product* (GNP), yang telah dikembangkan oleh para ekonom.

Dengan menggunakan GNP tersebut kita dapat membandingkan kekayaan suatu negara dengan negara lain. Namun, untuk mengukur apakah negara tersebut telah memenuhi kebutuhan rakyatnya, hitungan dengan GNP per kapita akan lebih relevan. Karena menurut pendapat Coplin dengan memberikan suatu kasus, belum tentu GNP nasional yang tinggi maka GNP per kapitanya juga tinggi. Karena GNP per kapita menyajikan gagasan lebih baik apakah jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara itu memenuhi kebutuhan rakyatnya.⁵²

Selain itu, Coplin berpendapat bahwa pemenuhan kapasitas barang dan jasa juga harus memperhitungkan jenis barang dan jasa yang beredar dalam negara tersebut. Perbedaan geografis, historis dan budaya

⁵⁰ Ibid, hlm: 115, 120

⁵¹ Ibid, hlm: 115

⁵² Ibid, hlm: 115

cenderung memberikan kapasitas yang berbeda-beda di setiap negara. Sedangkan konsumen biasanya menginginkan beraneka macam barang yang hanya bisa didapatkan dari perdagangan luar negeri.⁵³ Hal ini penting karena pada zaman ini hanya sedikit negara yang mengadakan swasembada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada negara lain.

2.2.3.2 Kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional

Tolok ukur kedua yang digunakan oleh Coplin untuk melihat kekuatan dan kelemahan ekonomi suatu negara adalah kebergantungan negara terhadap perdagangan dan finansial internasional. Yang menjelaskan bagaimana negara dapat menuntaskan kewajiban internasionalnya, dan membuat negara bergantung pada perdagangan dan arus finansial internasional.⁵⁴ Menuntaskan kewajiban internasional membuat negara akan terpaksa mengeluarkan cadangan negaranya, dan membawa negara rentan masuk dalam krisis global. Atau apakah kekayaan negara yang masuk ke dalam negeri dapat dimanfaatkan dan membuat negara berada dalam posisi yang menguntungkan.⁵⁵

Kemampuan negara memproduksi produk-produk untuk diekspor yang bisa mendapatkan pendapatan besar, bagaimana negara membayar produk impor dengan produk eksportnya, serta keterlibatan negara yang intensif dari luar negeri dibidang investasi swasta dan atau aktivitas-

⁵³ Ibid, hlm: 116

⁵⁴ Ibid, hlm: 121

⁵⁵ Ibid, hlm: 121

aktivitas ekonomi negara.⁵⁶ Pada intinya tolok ukur ini menjelaskan apakah pendapatan negara bergantung pada hasil ekspor dan impor dengan negara lain. Karena semakin bergantung negara tersebut terhadap kondisi internasional, maka semakin besar negara tersebut mengalami krisis global dan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Pada tolok ukur ini, Coplin menjelaskan bahwa kebergantungan negara pada perdagangan dan finansial internasional dapat membawa krisis ke dalam negara dan hal tersebut dapat menjadi alasan sebuah negara mengambil keputusan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dimensi kemampuan militer saling berkaitan satu sama lain. Pada dimensi kemampuan militer, coplin menyediakan tiga aspek yang akan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan suatu negara. Yang pertama adalah kapasitas relatif negara untuk menggunakan kekuatan militer; yang kedua adalah tingkat kebergantungan negara pada sumber luar negeri; dan yang terakhir adalah bagaimana ketidak-stabilan dalam negeri mempengaruhi kemampuan militer negara.⁵⁷

2.3.3.3 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

Kekuatan militer berkaitan dengan jumlah tentara, kualitas perlengkapan dan tingkat keterlembihan pasukan. Ketiga hal tersebut menurut Coplin adalah modal untuk memperkuat militer negara. Sedangkan untuk penggunaan militer adalah kemampuan untuk menghancurkan dan kemampuan mobilitas pasukan, karena belum tentu semua negara mempunyai kemampuan menghancurkan melalui militer.

⁵⁶ Ibid, hlm: 123

⁵⁷ Ibid, hlm: 124

Dalam hal ini Coplin memberi contoh bahwa ada negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan, namun pasukan negara tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerang jauh dari wilayahnya.⁵⁸

Untuk mewujudkan kekuatan militer yang kuat tersebut, Coplin berpendapat bahwa negara juga harus memiliki upaya lebih. Dalam hal ini Coplin menjelaskan bahwa negara yang memiliki anggaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan militernya, akan memiliki kekuatan yang mumpuni. Coplin berpendapat bahwa banyak negara yang memiliki GNP nasional yang tinggi biasanya makin tinggi pula kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer.⁵⁹ Sehingga untuk mengukur kapasitas penggunaan militer negara, kita akan melihat dari seberapa besar negara memberikan pendapatannya untuk melengkapi kekuatan militernya.

2.3.3.4 Tingkat Kebergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri

Untuk mendapatkan kemampuan militer yang mumpuni, sebuah negara membutuhkan produksi alat-alat militer dan sumber-sumber produksi militer tersebut tidak jarang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui seberapa besar kemampuan militer yang didapat dari sumber-sumber luar negeri. Semakin bergantung sebuah negara terhadap sumber-sumber militer luar negeri dalam menunjang

⁵⁸ Ibid, hlm: 125

⁵⁹ Ibid, hlm: 126

persenjataannya, semakin rawan pula negara tersebut terhadap kendala dari luar.⁶⁰

Menurut Coplin ada beberapa negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi persenjataan militernya sendiri. Namun, tidak berarti negara yang memounyai kemampuan untuk memproduksi sendiri akan sama sekali tidak bergantung pada negara lain.⁶¹ Negara tersebut tetap akan membutuhkan sumber bantuan dari negara lain, dan negara-negara tersebut tetap akan bergantung pada bahan mentah dan dukungan logistik melalui penggunaan wilayah. Sehingga tekanan akan bersifat relatif karena negara-negara ini pun bergantung pada negara lain dalam hal produk strategis.⁶² Sehingga untuk mengukurnya kita harus tahu seberapa besar produksi militer yang dilakukan oleh negara itu sendiri, ataukah negara lebih banyak mendapat bantuan militer dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan militernya.

2.3.3.5 Ketakstabilan Internal dan Kemampuan Militer

Coplin berpendapat bahwa kekuatan militer yang dipunyai oleh negara adalah untuk melindungi negara terhadap ancaman dari negara lain, namun selain itu, peran militer yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik dalam negeri. Apakah kondisi politik dalam negeri dalam keadaan damai dan bagaimana kekuatan militer digunakan untuk melindungi kestabilan politik dalam negeri.

⁶⁰ Ibid, hlm: 127

⁶¹ Ibid, hlm: 128

⁶² Ibid, hlm: 128

Agar bisa menaksir dengan tepat kapasitas suatu negara dalam menggunakan angkatan bersenjata dalam politik luar negerinya, kita perlu menentukan tingkat “keterikatan” kapasitas militer terhadap ancaman instabilitas dalam negeri.⁶³ Dengan kata lain, apakah militer bekerja mendukung rezim pemerintah dan bekerja dibawah kendali pemerintah negara.⁶⁴

2.3.4 *International Context*

International Circumstances yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.⁶⁵ Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem tertentu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.⁶⁶ Morgenthau berpendapat bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai perangkat seperangkat kepentingan nasionalnya yang obyektif. Kepentingan nasional yang memiliki hubungan dengan lingkungan internasional tersebut berpengaruh untuk menentukan politik luar negeri sebuah negara.⁶⁷ Dan menurut Coplin kondisi lingkungan yang dapat memberikan dampak pada penentuan politik internasional didasarkan pada tiga elemen yaitu geografi, hubungan ekonomi, dan hubungan politik negara tersebut dengan negara tetangganya.⁶⁸

⁶³ Ibid, hlm: 129

⁶⁴ Ibid, hlm: 129

⁶⁵ Ibid, hlm: 30

⁶⁶ Ibid, hlm: 167

⁶⁷ Ibid, hlm: 166

⁶⁸ Ibid, hlm: 167

2.3.4.1 Kertakaitan Geografi

Geografi berhubungan dengan perdagangan antara negara, pemberian suara negara tersebut dalam organisasi internasional, serta adanya kerjasama antara pemerintah.⁶⁹ Karena kedekatan geografis negara akan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari negara sekitarnya, ketika memutuskan suatu keputusan polugri. Keterkaitan geografis itu kemudian akan menjelaskan pola hubungan interaksi yang terbentuk antar negara.

2.3.4.2 Hubungan Ekonomi⁷⁰

Hubungan ekonomi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai arus barang dan jasa maupun arus modal yang membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lain. Lancar atau tidaknya hubungan ekonomi dengan negara partner akan menentukan sebuah negara mengambil suatu keputusan luar negeri. entah keputusan untuk memutuskan hubungan dagang atau keputusan untuk melanjutkannya. Dari sini kita dapat melihat hubungan ekonomi yang terlajin antar negara secara luas, tidak hanya dalam satu kawasan.

2.3.4.3 Hubungan Politik

Sedangkan hubungan politis merupakan pembentukan aliansi-aliansi, terutama yang menyangkut pasukan-pasukan diwilayah asing.⁷¹

Dalam indikator ini Coplin menjelaskan bahwa hubungan politik sebuah

⁶⁹ Ibid, hlm: 167

⁷⁰ Ibid, hlm: 167

⁷¹ Ibid, hlm: 168

negara dengan negara lain dalam lingkungan internasional sangat berperan dalam keputusan-keputusan polugri suatu negara.⁷²

Adanya elemen-elemen tersebut yang membuat *international circumstances* dapat membawa dampak pada keputusan politik luar negeri sebuah negara. International circumstances akan memungkinkan kita untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara hanya secara parsial. Kita dapat menjelaskan mengapa negara mengambil keputusan polugri, alih-alih kita harus menelaah proses-proses polugri dalam negara itu.⁷³

2.4 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh William D. Coplin mengenai pengambilan keputusan politik luar negeri. Dalam buku Pengantar politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, yang diungkapkan oleh Coplin menjelaskan bahwa keputusan politik luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh empat hal yaitu *Decision maker, domestic politics, economy and military factors*, dan *international context*. Keempat faktor tersebut adalah instrumen yang digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor penyebab dari keluarnya keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi pada Korsel tahun 2016-2017. Empat faktor yang dijelaskan Coplin tersebut digunakan sebagai variabel, yaitu sebagai berikut.

Yang pertama adalah variabel *decision maker*, yang menjelaskan bahwa keseluruhan politik luar negeri menurut perilaku seorang pemimpin yang khas. Variabel ini adalah variabel yang menjelaskan peran perilaku pengambil

⁷² Ibid, hlm: 167

⁷³ Ibid, hlm: 168

keputusan yaitu pemimpin negara yang dapat menjadi penyebab keluarnya keputusan politik luar negeri suatu negara. Bahwa menjelaskan seberapa penting pemimpin sebuah negara dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Sehingga jika dikaitkan dengan studi kasus yang dipilih oleh penulis akan merujuk kepada pemimpin negara Tiongkok pada tahun 2013-2016, tahun dimana keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel diterapkan, dan pada saat Xi Jinping mulai menjabat, serta juga sebagai ruang lingkup waktu penelitian ini.

Dalam variabel ini penulis akan mencari tahu seberapa pentingnya keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin Tiongkok. Hal tersebut kemudian akan juga menjelaskan bagaimana pengaruh dari pemimpin negara dalam suatu keputusan polugri negara. Semakin besar pengaruh dari pemimpin negara dalam pengambilan keputusan untuk urusan politik luar negeri, maka semakin besar pula pemimpin berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 2016-2017.

Tiongkok merupakan negara dengan sistem politik tertutup, yang ditandai dengan adanya satu partai yang dominan yaitu *Communist Party of China* (CPC).⁷⁴ Oleh karena itu penulis melihat bahwa variabel *desicion maker behavior* ini merupakan salah satu faktor yang sangat potensial untuk menjadi faktor penyebab Tiongkok mengambil keputusan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel th. 2016-2017. Yang akan dilihat dari seberapa berpengaruhnya jabatan Presiden di Tiongkok dalam mengambil keputusan polugri.

⁷⁴ Linda Jackobsin dan Ryan Manuel. "How are Foreign Policy Desicions Made in China?". Asia and the Pasific Policy Studies, vol. 3, no.1, pp. 101-110.

Variabel yang kedua adalah *domestic politics*, dalam variabel ini Coplin menjelaskan mengenai kondisi politik domestik dapat memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan polugri suatu negara. Coplin menjelaskan dalam level domestik, ada aktor-aktor yang berperan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan studi kasus yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini, yang disebut aktor-aktor tersebut antara lain yaitu kementerian-kementerian terkait, adanya pengaruh dari partai, adanya kelompok-kelompok kepentingan, dan adanya opini publik yang biasanya disuarakan melalui media massa yang berada di wilayah Tiongkok.⁷⁵

Tiongkok merupakan negara dengan sistem politik tertutup, maka untuk variabel ini dirasa tidak relevan dengan studi kasus. Oleh karena itu penulis akan mengkonstantakan variabel *domestic politics*, karena kondisi politik dalam negeri Tiongkok bukan merupakan penyebab dari keputusan Tiongkok untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Hal ini berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh Coplin bahwa negara dengan sistem politik tertutup, kelompok-kelompok yang revolusioner biasanya lemah, dan jika ada kelompok yang revolusioner biasanya berada diluar batas-batas geografis negara yang bersangkutan.⁷⁶ Dan oleh karena Tiongkok merupakan negara dengan sistem tertutup maka variabel *domestic politics* ini tidak akan terlihat jelas, dan dirasa kurang relevan dengan keadaan dalam negeri Tiongkok sendiri.

Variabel yang ketiga adalah *economics and military factors*, seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya penulis melihat bahwa variabel ini

⁷⁵ Op, cit Coplin. hlm: 81

⁷⁶ Ibid, hlm: 85

mempunyai potensi yang tinggi untuk dikatakan sebagai penyebab mengapa Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Dalam variabel ini dijelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan militer negara dapat menjadi penyebab keluarnya suatu keputusan polugri. Walaupun kedua faktor tersebut saling berkaitan, Coplin membedakan faktor ekonomi dan militer untuk mempermudah pemberian indikator pada masing-masing faktor. Jika variabel ini dikaitkan dengan studi kasus maka memiliki dua indikator atau tolok ukur penyebab keluarnya keputusan Tiongkok dari faktor ekonomi, dua indikator tersebut yaitu yang pertama diukur dari pendapat perkapita dan kondisi ekonomi domestik Tiongkok pada tahun 2013-2016. Indikator ini menjelaskan apakah keduanya berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih, sehingga tidak menyebabkan masalah baru bagi negara itu sendiri.

Indikator kedua untuk faktor ekonomi adalah besarnya jumlah ekspor impor dari Tiongkok ke Korsel. Pada indikator ini kita dapat melihat ketergantungan Tiongkok pada produk barang dan jasa dari Korsel di tahun 2013-2016. Ketergantungan sebuah negara pada negara lain pada sektor ekonomi akan mempengaruhi negara tersebut dalam membuat keputusan polugri.

Sedangkan dalam faktor militer Coplin menyediakan tiga tolok ukur untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan faktor ekonomi. Tiga indikator tersebut yang pertama adalah kapasitas penggunaan militer, yang jika dikaitkan dengan studi kasus akan melihat bagaimana Tiongkok bersedia mengeluarkan anggarannya untuk belanja kebutuhan militer negara. Semakin banyak jumlah anggaran yang dikeluarkan Tiongkok untuk memenuhi kemampuan militernya

pada tahun 2013-2016, dapat menjadi alasan Tiongkok mengeluarkan tindakan kepada Korsel.

Indikator yang kedua dalam faktor militer adalah adanya aliansi Tiongkok dengan Korsel dalam bidang militer pada tahun 2013-2016. Adanya aliansi negara dengan negara lain, maka ada kemungkinan negara tersebut mengadakan jual-beli ataupun mendapat bantuan militer untuk memenuhi kebutuhan negara. Jika terdapat aliansi ataupun perdagangan dengan Korsel dalam jumlah yang besar, dapat memungkinkan Tiongkok mengalami ketergantungan terhadap pasokan dari negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan ekspor-impor antara Tiongkok dan Korsel pada tahun 2013-2016.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah ketidakstabilan internal dan kemampuan militer, yang diekspresikan melalui kekuatan militer Tiongkok, apakah militernya bekerja dibawah pemerintahan atau merupakan instansi tersendiri. Kekuatan militer yang bekerja dibawah perintah pemerintah negara merupakan alat yang digunakan negara sebagai pendukung rezim pemerintah. Oleh karena itu disini kita dapat melihat apakah kekuatan militer Tiongkok mendukung rezim pemerintah atau tidak, karena kekuatan militer dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik dalam negeri.⁷⁷

Sedangkan variabel yang keempat adalah *international context*, variabel ini memiliki tiga indikator yang dapat menjelaskan dampak konteks internasional terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu geografi, hubungan ekonomi dan hubungan politik. Jika dikaitkan dengan tindakan Tiongkok

⁷⁷ Op.cit. hlm: 129

memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel, kebutuhan geografis merupakan kebutuhan geopolitik, seperti yang dikemukakan oleh Coplin, bahwa negara-negara akan berusaha memperluas wilayahnya. Serta kedekatan geografis sebuah negara akan menentukan keputusan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Sehingga dalam hal ini kedekatan wilayah Tiongkok dengan Korsel dapat menjadi latar belakang Tiongkok melakukan tindakan pemberian sanksi ekonomi kepada Korsel.

Untuk hubungan ekonomi dalam *international context*, Coplin menjelaskan mengenai arus barang dan jasa serta modal yang terjadi antara negara-negara. Disini penulis akan melihat tren perekonomian Tiongkok pada tahun 2013-2016 secara luas. Dari sini kita dapat melihat tekanan-tekanan perdagangan yang ditimbulkan akibat menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Perbedaannya dengan indikator sebelumnya yaitu keberantungan pada perdagangan dan finansial internasional terletak pada ruang lingkupnya. Pada indikator ini penulis akan melihat bagaimana hubungan ekonomi Tiongkok dengan negara selain Korsel. Jika Tiongkok menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain, maka kemungkinan besar Tiongkok memiliki cadangan sumber daya yang membuat Tiongkok memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel.

Serta tolok ukur yang terakhir dari *international context* adalah hubungan politik yang menurut Coplin sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Dan jika dikaitkan dengan studi kasus maka penulis akan melihat hubungan politik Tiongkok dengan Korsel pada tahun 2013- 2016. Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kedua negara dalam jangka waktu tersebut merupakan kunci

utama dari alasan Tiongkok memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. *International context* merupakan faktor dari luar negeri yang membuat tekanan tertentu pada negara untuk mengambil suatu keputusan politik luar negeri, yang merupakan suatu tindakan suatu negara terhadap masalah tertentu.



Tabel 1: Operasionalisasi Konsep

Decision Making Concept Oleh: William D. Coplin		
Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Desicion maker</i>	Pengaruh seorang pengambil keputusan	Pengaruh Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok dalam mengambil keputusan tahun 2013-2016
<i>Economi and Military Factors</i>	Kapasitas produksi barang dan jasa	- GNP Perkapita Tiongkok tahun 2013-2016 - kondisi ekonomi Tiongkok tahun 2013-2016
	Kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional	Besarnya ekspor dan impor Tiongkok dari/ke Korsel tahun 2013-2016
	Kapasitas penggunaan militer	Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok untuk kebutuhan militer tahun 2013-2016
	Tingkat kebergantungan pada sumber-sumber militer luar negeri	Adanya kegiatan ekspor-impor antara Tiongkok dan Korsel tahun 2013-2016
	Ketastabilan internal dan kemampuan militer	Kekuatan militer Tiongkok yang bekerja dibawah pemerintah negara
<i>International Context</i>	Geografis	Letak wilayah (batas wilayah) Tiongkok dengan Korsel
	Hubungan ekonomi	Hubungan ekonomi Tiongkok dengan negara selain Korsel tahun 2013-2016
	Hubungan Politik	Hubungan politik Tiongkok dengan negara lainnya tahun 2013-2016

Sumber: diolah oleh penulis

2.5 Argumen Utama

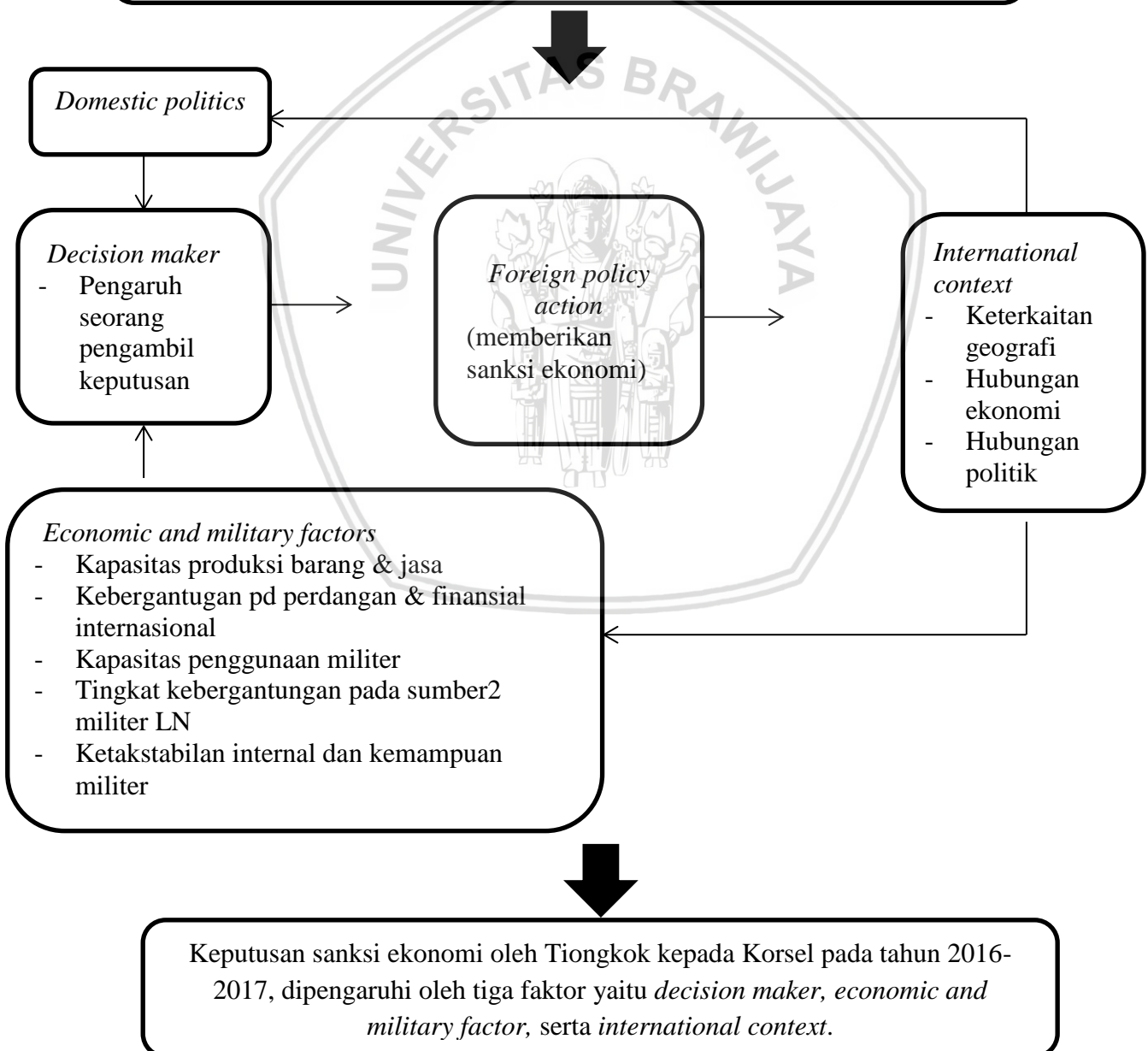
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang digunakan kita dapat menarik kesimpulan sementara yaitu bahwa keputusan Tiongkok untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017 adalah karena adanya tiga faktor penyebab yang determinan. Tiga faktor tersebut terdiri dari *Desicion maker, economic and military factors dan international context*, yang mana ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh kepada pengambil keputusan secara langsung-maupun tidak langsung.



2.6 Alur Pemikiran

Pada juli 2016 Korsel memberikan respon untuk tindakan uji coba nuklir yang dilakukan Korut dengan mengembangkan sistem THAAD. Tiongkok tidak setuju dengan respon tersebut, ketidak setujuannya itu ditunjukkan dengan memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Tiongkok memberikan sanksi ekonomi dibandingkan dengan tindakan lain untuk merespon ketidaksetujuannya.

Apa faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017?



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis kemudian menentukan bahwa urgensi penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Tiongkok untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi Tiongkok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap THAAD dengan memberikan sanksi ekonomi, ketimbang dalam bentuk yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif karena penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara pengembangan THAAD di Korsel dengan keputusan sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Adapun bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah dengan mengambil studi kepustakaan atau *library research*. Dengan sumber seperti buku, koran, majalah, makalah, internet, jurnal dan lain-lain sebagai bahan untuk mencari informasi dari obyek penelitian yang penulis gunakan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian dengan menentukan ruang lingkup penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian memiliki data dan waktu pencarian yang relevan. Ruang lingkup waktu yang penulis gunakan yaitu antara tahun 2013-2017. Alasan penulis menggunakan ruang lingkup tersebut adalah bahwa pada masa tersebut, berkaitan dengan urgensi penulis untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi Tiongkok dalam memberikan keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel. Bahwa pada tahun 2013, merupakan tahun dimana Korsel mengajukan proposal kepada AS untuk meminta bantuan mengembangkan THAAD. Dan pada tahun yang sama, Tiongkok memberikan

respon terhadap tindakan Korsel tersebut dengan menyatakan ketidaksetujuan di berbagai kesempatan.

Sedangkan penelitian ini berhenti di tahun 2017, pada tahun tersebut Korsel mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dari Presiden Park Geun Hye menjadi Presiden Moon Jae In. Pergantian kepemimpinan ini mengakibatkan kesepakatan mengani THAAD antara Korsel dan AS berubah, dikarenakan kedua presiden Korsel tersebut menganut prinsip yang berbeda. Perbedaan prinsip itu juga pada akhirnya memicu Tiongkok untuk mengkaji ulang keputusan sanksinya kepada Korsel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan bentuk penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder tersebut berupa studi pustaka dan dokumen. Metode pengumpulan data studi pustaka dilakukan melalui pencarian sumber tertulis. Sumber tertulis tersebut dapat berbentuk buku, jurnal, publikasi media, dan/atau dokumen pemerintah.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif yang mana data tidak dianalisis menggunakan indikator yang bersifat numerik melainkan penulisan penelitian akan diuraikan dan digambarkan dengan kalimat, yang menjelaskan mengenai permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang kemudian dari situ akan diambil kesimpulan. Dalam teknik ini dilakukan beberapa langkah diantaranya pengumpulan data, klarifikasi data, seleksi data dan kemudian menganalisa data dengan cara menginterpretasikan data dengan konsep atau teori yang telah ditentukan kedalam sebuah kalimat berbentuk paragraf.

3.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan penelitian faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok memberikan sanksi kepada Korsel, penulis menyusunnya ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II: Kerangka Pemikiran

Berisikan kerangka pemikiran dengan penjabaran pada studi terdahulu, kerangka teoritis, definisi konseptual, definisi operasional, alur pemikiran dan Hipotesis.

BAB III: Metodologi Penelitian

Merupakan metode penelitian dengan isian jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: Gambaran Umum

Merupakan gambaran umum yang berisikan bentuk sanksi ekonomi Tiongkok sebelum tahun 2016, dan implementasi sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel pada tahun 2016-2017

BAB V: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan dari temuan-temuan penulis mengenai faktor yang mempengaruhi sanksi ekonomi Tiongkok yang merupakan hasil dari pengeoperasian konsep. Dalam bab ini akan ada analisis terkait variabel-variabel yang ada dalam konsep. Dan Bab ini juga menyajikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB VI: Kesimpulan

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Bentuk Sanksi Ekonomi Tiongkok

Sejak reformasi pada tahun 1978, Tiongkok menggunakan kebijakan luar negeri secara intensif sebagai alat untuk kepentingan ekonomi yang lebih lanjut. Namun pada tahun 2000an, Tiongkok mulai membalikkan strategi dan mulai menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi hubungan internasional.⁷⁸ Secara historis, Tiongkok menolak sanksi ekonomi sebagai prinsip kebijakan luar negerinya, prinsip ini telah ada dari kebijakan Tiongkok tradisional. Prinsip damainya yang juga termasuk “*mutual non-interference in each other’s internal affairs*”, Tiongkok pada umumnya menafsirkan prinsip ini sebagai cara untuk menolak urusan negara lain melalui organisasi internasional atau cara lain, termasuk menerapkan sanksi.⁷⁹

Pada tahun 2011, Tiongkok menyatakan abstained untuk pengambilan suara pada *United Nations Security Councils Resolutions* (UNSCR) 1973 yang bertujuan membuat no-fly zone dan membawa intervensi di Libya.⁸⁰ Namun pada tahun 2012, Tiongkok memberikan veto yang dimaksudkan untuk menghentikan pertumpahan darah di Syria.⁸¹ Hal ini membuktikan bahwa prinsip tradisional dalam kebijakan nasional yang dipegang oleh Tiongkok bersifat fleksibel, untuk memberikan justifikasi pada tindakan di arena diplomatik internasional.

Sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korea Selatan pada tahun 2016-2016 bukanlah sanksi ekonomi pertama yang diberikan Tiongkok kepada negara lain. Pada 12

⁷⁸ Op,cit Xianwen. Hlm: 33

⁷⁹ Nathan Beauchamp-Mustafaga dan Jenny Jun. 2013. “*Getting China to Enforce Sanctions on North Korea*”. Yonsei Journal of International Studies.

⁸⁰ Ibid, hlm: 57

⁸¹ Zhong Sheng, “China: No interference in Syria’s internal affairs,”[online] dalam People’s Daily, October 13, 2011. Diakses melalui: <http://english.peopledaily.com.cn/90780/7616513.html>.

Februari 2013, Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara (Korut) untuk memberikan respon terhadap uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh Korut.⁸² Namun sanksi ekonomi ini tidak secara langsung ditujukan oleh Tiongkok kepada Korut, melainkan melalui perantara yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .

Tiongkok mendukung keputusan UNSCR 1973 untuk memberikan sanksi kepada Korut yang telah mengkhawatirkan masyarakat dengan adanya uji coba nuklir. Tiongkok sangat menentang nuklir Korut, namun tidak serta-merta langsung menandatangani kesepakatan sanksi tersebut. Pada tahun 2006, Tiongkok menyatakan keterlibatan Presiden Hu Jintao dalam menyebut “*Flagrant*” (*han-ran*)⁸³ dan menolak draft sanksi pertama yang diajukan AS, yang kemudian terjadi tawar-menawar yang berlangsung selama 5 hari hingga disetujui UNSCR 1718.⁸⁴ Sedangkan pada tahun 2009, Tiongkok yang menentang keras nuklir Korut masih mencari celah untuk menjual senjata kecil kepada Korut.

Pada tahun 2013, Tiongkok pada akhirnya menyetujui draft sanksi ekonomi, dan mengadakan kerjasama untuk memberikan sanksi kepada Korut. Sanksinya berupa ketentuan yang mengharuskan negara untuk memeriksa kargo milik Korut, yang dicurigai mengangkut barang-barang yang dilarang dalam kesepakatan UNSCR terhadap Korut.⁸⁵ Menghambat Korut pada akses uang tunia, dan menerapkan daftar hitam bagi diplomat dan pejabat Korut dengan koneksi nuklir atau kegiatan *money laundering*, dan secara *explicit* melarang beberapa barang mewah.⁸⁶

Sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok kepada Korea Selatan juga bukan yang pertama kali terjadi, dan sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok kepada Korsel memiliki pola yang berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada Korut. Kepada Korsel, Tiongkok

⁸² Loc,cit Nathan dan Jenny. Hlm: 49

⁸³ Istilah yang biasa dipakai Tiongkok untuk menyebutk musuh-musuh Tiongkok.

⁸⁴ Loc,cit Nathan dan Jenny. Hlm: 49.

⁸⁵ Ibid. Hlm: 50

⁸⁶ Ibid. Hlm: 50

menerapkannya secara langsung tanpa adanya perantara atau kesepakatan terlebih dahulu. Tiongkok menerapkan 2 kali sanksi ekonomi kepada Korsel sebelum tahun 2016-2017.

Sanksi ekonomi yang pertama kali diterapkan Tiongkok pada Korsel adalah pada tahun 2000-2001, yang dikenal sebagai "*The garlic war*" (*dasuan zhi zhan*). Konflik bawang putih antara Tiongkok dan Korsel ini terjadi sebelum adanya akses Tiongkok ke *World Trade Organisation* (WTO), yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan tindakan balasan terhadap negara-negara lain dalam sengketa perdagangan. Oleh karena itu sejarah pemberian sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel ini dapat menjadi gambaran dalam penelitian ini, mengenai bagaimana Tiongkok bereaksi terhadap konflik perdagangan.

The garlic war bermula pada usulan federasi koperasi Korsel yang mengajukan "*trade remedy*" atau perbaikan perdagangan tentang impor bawang putih Tiongkok, yang dikarenakan adanya protes dari petani bawang putih lokal yang mengalami kerugian. Pengajuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Finansial dan Ekonomi (MOFE) dan Kementerian Agrikultur dan Kehutanan (MAF). Keduanya setuju untuk menaikkan tarif impor bawang putih beku dan acar menjadi 315%, serta tarif bawang putih kupas dari Tiongkok sebesar 436%.⁸⁷

Tiongkok dengan tegas sangat menentang kebijakan baru yang diterapkan oleh Korsel tersebut, karena hal tersebut membawa kerugian bagi pihak Tiongkok sendiri. Maka dari itu, Tiongkok mengancam akan membatasi impor barang-barang industri Korsel. Tiongkok menuntut tarif ekspor bawang putih untuk segera dicabut. Pemerintah Korsel yang terkejut dengan ancaman tersebut mencari jalan lain untuk mencapai kesepakatan, yang pada akhirnya pemerintah Korsel menawarkan kompensasi atas kerugian Tiongkok.⁸⁸ Namun

⁸⁷ David Zweig dan Chen Zhimin. 2007. "*how china responds to trade sanctions: decoding to the Sino-South Korea 'Garlic War'*" dalam *China reforms and International Political Economy*. Routledge: New York.

⁸⁸ Ibid. Hlm: 187

negosiasi tersebut tidak berjalan lancar dan pihak Tiongkok menolaknya. Sehingga pada 7 Juni 2000, pemerintah membalas kebijakan tarif Korsel dengan melarang impor ponsel genggam dan polythylene dari Korsel. Pemerintah Korsel terkejut dengan respon tak terduga Tiongkok, yang memberikan larang impor ketimbang menerapkan tarif yang tinggi seperti yang dilakukan Korsel. Tiongkok memilih produk industri yang penting, dan bernilai tinggi bagi Korsel. Ekspor kedua produk industri yang bernilai 57 kali lipat lebih tinggi daripada impor bawang putih Tiongkok tersebut, sangat memberikan pengaruh pada kelangsungan ekonomi dalam negeri Korsel.⁸⁹ Oleh karena itu Korsel mengadakan negosiasi kembali dengan Tiongkok.

Pada 14 July, konsesi penting yang tercapai adalah bahwa pemerintah Korsel akan mengijinkan lebih dari 20.000 ton acar dan bawang putih beku dengan tarif 30%, termasuk kuota dari 11.895 ton bawang putih segar dengan tarif 50%.⁹⁰ Negosiasi ulang yang pada akhirnya membawa kerugian bagi Korsel tersebut akhirnya mencapai kesepakatan. Dan pada April 2001, Tiongkok kembali mengancam Korsel untuk melarang impor produk-produk industrinya jika kesepakatan tersebut tidak segera diimplementasikan.⁹¹

Sanksi ekonomi kedua yang pernah diberikan Tiongkok kepada Korsel disebut sebagai “Kimchi War”. Konflik perdagangan kedua yang terjadi antara Tiongkok dan Korsel adalah pada tahun 2004-2005. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Korsel ini berawal dari pihak Korsel, yaitu Korea Food and Drug (KFDA) menemukan dan mengumumkan 16 dari produk kimchi milik Tiongkok mengandung telur parasit yang

⁸⁹ Ibid. Hlm: 195

⁹⁰ Ibid. Hlm: 196.

⁹¹ Ibid. Hlm: 197

melebihi dari yang jumlah kandungan yang diizinkan.⁹² Produk yang disebutkan tersebut kemudian dibuang dan dihancurkan.

Setelah pengumuman dan pemberitahuan tersebut, masyarakat Korsel tidak mengonsumsi kimchi asal Tiongkok, walaupun harganya jauh lebih murah dibandingkan kimchi produk lokal. Menanggapi hal tersebut, pada 31 oktober 2005, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China (GAQSIQ) mengumumkan 10 macam produk makanan Korsel yang dilarang masuk ke Tiongkok. Produk makanan tersebut termasuk produk kimchi, pasta cabai, dan saus daging barbeque, yang dilarang impor ke Tiongkok dengan alasan mengandung telur parasit.⁹³ Setelah beberapa negosiasi dan konsultasi diantara kedua pemerintahan, maka terjadi kesepakatan dan pelarangan dari produk-produk yang diimpor dicabut pada akhir tahun 2005.⁹⁴ Walaupun demikian, perhatian kedua negara tentang keamanan produk masih berlanjut dan kedua negara lebih memperketat inspeksi pada produk impor, terutama pada makanan dan kosmetik.

4.2 Implementasi Sanksi Ekonomi Tiongkok kepada Korsel Pada Tahun 2016-2017

Pada tahun 2016-2017 pemerintah Tiongkok tercatat menggunakan ekonomi koersif yang ditujukan kepada bisnis Korea Selatan (Korsel) secara individu maupun kelompok, yang mengakibatkan dampak buruk bagi pertumbuhan dan kerjasama ekonomi kedua negara maupun negara sekitarnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Tiongkok memiliki ciri khas tersendiri ketika menjalankan keputusan pemberian sanksi

⁹² Jean Lin. "*contaminated kimchi sparks spat*"[online]. Diakses melalui: <http://www.taipetimes.com/News/front/archives/2005/11/04/2003278621>

⁹³ Zhou Shengqi. 2010. "*Sino-South Korea trade relations: from boom to reseccion*". Dalam dalam China and the Global Economic Crisis. World Scientific Publishing: Singapore. Hlm: 224

⁹⁴ Ibid, hlm: 225

ekonomi. Tiongkok cenderung tidak kentara, tidak diumumkan secara resmi dan pemerintah selalu tidak mengakui tindakan sanksi ekonomi kepada pihak lain.⁹⁵

Sehingga penerapan sanksi ekonomi Tiongkok kepada negara lain dilaksanakan tanpa adanya pernyataan lisan dan tulisan, tanpa adanya undang-undang yang formal, ruang lingkup bidang yang terbatas, serta durasi pelaksanaan yang tidak ditentukan.⁹⁶ Tiongkok memberikan sanksi kepada negara, kelompok bahkan individu yang dianggap menentang atau merusak kepentingan serta keamanan nasional Tiongkok sendiri.⁹⁷ Yang salah satunya dijatuhkan kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Tindakan sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok kepada Korsel secara nyata adalah berupa larangan ekspor-impor, hambatan perdagangan berupa regulasi ekspor-impor yang diperketat sehingga ada indikasi Tiongkok memberikan diskriminasi terhadap produk Korsel, larangan perjalanan, dan pembekuan aset.⁹⁸

Hallyu (*korean wave*) adalah salah satu produk Korsel yang terkena larangan untuk beredar di daratan Tiongkok. Hallyu merupakan *Korean Entertainment* yang mencakup drama televisi, music K-pop, film, *Art*, hingga makanan yang telah diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1990.⁹⁹ Hallyu dinikmati oleh banyak anak muda di Tiongkok, yang mencapai 150 juta penonton yang tercatat oleh badan yang bertanggung jawab atas konten penyiaran di televisi atau disebut *China Central television* (CCTV) pada tahun 2015.¹⁰⁰

Musik K-pop juga banyak dinikmati kalangan remaja Tiongkok sejak tahun 1997. Sejak masuknya hallyu ke daratan Tiongkok, pemerintah kedua negara saling bekerja sama untuk

⁹⁵ Xianwen Chen. 2016. "Economy sanction and trade diplomacy: sanction-busting strategies, market distortion and efficacy of China's Restriction on Norwegian salmon import". Norwegian Institute for Nature Research, norway (Vol. 30(1)29-57)

⁹⁶ Ibid, hlm: 30

⁹⁷ Ethan Meick and Nargiza Salidjanova. 2017. "China's Response to US South Korea Missile Defense System Deployment and Its Implication". Report from US-China Economic and Security Review Commission.

⁹⁸ Ibid, hlm: 5

⁹⁹ Anonim. "Hallyu (*Korean wave*)". Diakses melalui: <http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu>

¹⁰⁰ Ibid.

terus mengembangkan budaya tersebut dengan membangun kerjasama Sino-Korea. Kerjasama tersebut kemudian banyak terjadi pertukaran budaya, adanya penyelenggaraan konser, kerjasama program televisi, serta banyaknya investasi dibidang industri hiburan. Hal ini kemudian menjadikan Tiongkok sebagai pasar terbesar kedua setelah Jepang yang membawa presentase keuntungan 27,6% pada tahun 2015.¹⁰¹

Pemerintah Tiongkok memanfaatkan kepopuleran hallyu sebagai senjata yang ampuh untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Pada Januari 2017 beberapa *event* hallyu seperti konser, *fan meeting*, bahkan undangan acara penghargaan kepada artis-artis Korsel ditangguhkan dan bahkan dibatalkan tanpa adanya penjelasan lebih rinci.¹⁰² Pemerintah Tiongkok melarang adanya pertunjukan yang dibintangi, didanai, berafiliasi dan diproduksi oleh perusahaan Korsel.¹⁰³ Sehingga pihak yang tetap bersikeras mengadakannya akan dikenakan denda sebesar 17 juta won atau sekitar \$ 4.460 US dollar.¹⁰⁴

Pemerintah Tiongkok juga melarang pihak CCTV untuk menyiarkan program televisi yang berasal dari Korsel, yang mana regulasi tersebut juga berlaku pada siaran online maupun offline.¹⁰⁵ Akibatnya saham perusahaan hiburan Korsel turun, beberapa perusahaan hiburan besar di Korsel seperti YG Entertainment, JYP, CJE&M, dan SM Entertainment mengalami total penurunan saham sebanyak 300 juta won dalam 3 hari.¹⁰⁶

Selain hallyu, pemerintah Tiongkok juga menerapkan pelarangan terhadap penjualan dan distribusi pembersih udara milik Korsel. Ada 8 produk pembersih udara yang gagal memenuhi standart keselamatan menurut regulasi di Tiongkok, dan 5 dari produk tersebut

¹⁰¹ Report for investment opportunities in Korea: Cultural Contents. Diakses melalui:

<http://www.investkorea.org/en/published/publications.do?mode=download&articleNo=71373&attachNo=10702>

¹⁰² Op,cit. Ethan meick and Nargiza Salidjanova. hlm: 7

¹⁰³ Emiko Jozuka dan Sol Han. 2017. "Why South Korea Companies, entertainers are getting cold shoulder in China". Diakses dari: <https://edition.cnn.com/2017/02/23/asia/south-korea-china-thaad-retaliation/index.html>

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Op,cit. Ethan meick and Nargiza Salidjanova. hlm: 7

¹⁰⁶ Anonim. 2016. "Tiongkok dan Korea Selatan Perang Dingin Artis K-Pop jadi Kambing Hitam?". Diakses melalui: <http://asiangrup.com/hubungan-china-korea-selatan-bermasalah-artis-k-pop-jadi-kambing-hitam/>

merupakan produk asal Korsel.¹⁰⁷ Produk-Produk *high technology* yang berasal dari Korsel, kebanyakan mengalami gagal uji pada inspeksi barang import dengan berbagai alasan. Banyak produk dari negara lain juga gagal memenuhi standart inspeksi tersebut, Namun 80% produk yang gagal merupakan dari Korsel. pada tahun 2013 Korsel berada diurutan pertama sebagai partner import Tiongkok. Namun pada 2015 dan 2016 jumlah import Tiongkok dari Korsel menurun cukup signifikan.

Produk kosmetik yang berasal dari Korsel juga gagal masuk Tiongkok, ada 28 macam produk kosmetik yang dilarang masuk ke Tiongkok 19 diantaranya merupakan produk kosmetik milik Korsel dihitung per januari 2017.¹⁰⁸ Produk-produk tersebut termasuk shampo dari CJ Lion, sabun mandi produk dari Aekyung, *Lotion* dan produk kosmetik lain dari Laso, serta produk masker.¹⁰⁹

Pelarangan berbagai produk Korsel tersebut kebanyakan adalah hasil dari investigasi import yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga 80% produk Korsel gagal memenuhi standar pemeriksaan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah Tiongkok memperketat regulasi dan izin produk import kosmetik dan makanan, yang meliputi standar kemasan hingga kandungan bahan-bahannya.¹¹⁰ Dengan adanya penerapan regulasi yang baru tersebut, dapat diindikasikan sebagai upaya pemerintah Tiongkok melakukan diskriminasi terhadap produk-produk Korsel untuk masuk ke Tiongkok. Walaupun Korsel bukanlah negara satu-satunya yang terkena inspeksi tersebut, namun Korsel merupakan negara yang produknya paling banyak gagal lolos standar baru yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Negara lain diantaranya adalah Taiwan, New Zealand, Brazil, Kanada, Australia, Russia, Korea

¹⁰⁷ *Performance items are not eligible*. Diakses melalui:

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201612/t20161220_479169.htm

¹⁰⁸ Yoon Ja-Young, "China bans imports of 19 Korean cosmetics". Diakses melalui:

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2017/01/488_221794.html

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ White Paper on Food Quality and safety. Diakses melalui:

<http://www.china.org.cn/english/news/221274.htm#>

repository.ub.ac.id

Selatan, dan Chile merupakan negara-negara yang gagal memenuhi standar regulasi import Tiongkok.¹¹¹

Bentuk sanksi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Korsel mencakup segala bidang, Tiongkok juga memberlakukan *Asset Freeze* atau pembekuan asset milik Korsel yang berada diwilayah Tiongkok. Asset yang terkena pembekuan adalah Lotte, yang merupakan perusahaan waralaba miliki Korsel yang telah membuka gerai di Tiongkok sejak 20 tahun yang lalu. Pada awal April 2017, pemerintah Tiongkok berhasil menutup 75 gerai dari total 99 gerai milik Lotte yang berada di *mainland* Tiongkok.¹¹² Menurut pemerintah Tiongkok, Lotte melanggar regulasi Tiongkok mengenai standar keamanan dan keselamatan kebakaran.

Dalam implementasinya, pemerintah Tiongkok juga melakukan larangan perjalanan dari Tiongkok menuju Korsel, hal ini merupakan yang pertama kalinya diterapkan Tiongkok setelah wabah MERS melanda Korsel pada pertengahan tahun 2015.¹¹³ *China National Tourism Administration* (CNTA) mengadakan pertemuan dengan para pelaku bisnis travel yang menyediakan jasa perjalanan pariwisata ke Korsel dan memberikan instruksi verbal untuk mengguhkan penjualan paket perjalanan ke Korsel, secara *online* maupun *offline*.¹¹⁴ Destinasi paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Tiongkok di Korsel adalah Pulau Jeju, namun menurut *Jeju Tourism Association* pada maret 2017 wisatawan Tiongkok menurun sebanyak 46% dibanding diwaktu yang sama pada tahun sebelumnya.¹¹⁵

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Op. Cit, Ethan meick and Nargiza Salidjanova. hlm: 7

¹¹³ Anonim. "South Korea Tourism Hit by China Ban". Diakses melalui: <http://www.bbc.com/news/business-40565119>

¹¹⁴ Anonim. "China bans trips sales to Korea". Diakses dari: <http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/03/02/0200000000AEN20170302012700320.html>

¹¹⁵ Jenna Gibson. "China's Tourist Boycott Backfires on South Korea's Jeju Island". Diakses melalui: <https://thediplomat.com/2017/03/chinas-tourist-boycott-backfires-on-south-koreas-jeju-island/>

Wisatawan Tiongkok sendiri menyumbang \$22 miliar US dollar untuk Korsel dibidang pariwisata, yang berarti 1,6% total GDP Korsel.¹¹⁶ Wisatawan Tiongkok merupakan wisatawan tertinggi di Korsel. Karena itu Tiongkok memanfaatkan posisinya yang dibutuhkan oleh Korsel untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Gambar 1: Larangan Perjalanan oleh Pemerintah Tiongkok ke Jeju tahun 2015¹¹⁷



Penurunan jumlah wisatawan tersebut dikarenakan pemerintah Tiongkok yang mengeluarkan peringatan sebelumnya, mengenai perjalanan ke Pulau Jeju, Korea Selatan. Larangan tersebut dikeluarkan pada 3 Maret 2017, yang mengakibatkan penurunan wisatawan Tiongkok secara drastis yang tercatat pada tanggal 15 maret 2017.¹¹⁸

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Martin Moodie. "Korean travel retail n crisis as china bans group tour sales to South Korea amid escalating THAAD dispute". Diakses melalui: <https://www.moodiedavittreport.com/korean-travel-retail-in-crisis-as-china-bans-group-tour-sales-to-south-korea-amid-escalating-thaad-dispute/>

¹¹⁸ Op.cit. China bans trips sales to Korea,

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SANKSI EKONOMI TIONGKOK KEPADA KOREA SELATAN PADA TAHUN 2016-2017

Tiongkok merupakan salah satu negara yang menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sanksi ekonomi yang Tiongkok lakukan biasanya lebih banyak ditargetkan kepada perusahaan – perusahaan negara dengan tujuan untuk merugikan kegiatan ekonomi mikronya, kepentingan finansial dan juga komersial yang dilakukan di wilayah Tiongkok dan/atau sektor yang mengandalkan Tiongkok sebagai konsumen maupun produsen.¹¹⁹ Sanksi ekonomi tersebut juga diterapkan kepada korsel sebagai bentuk atas ketidaksetujuan Tiongkok terhadap pengembangan sistem THAAD yang dilakukan di Korsel.

Pada bagian ini, akan dijelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi Tiongkok untuk menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat ketidaksetujuannya tersebut, dibandingkan dengan cara lainnya terhadap tindakan Korsel mengembangkan sistem THAAD. Dengan adanya pembahasan ini kita kemudian dapat mengetahui faktor determinan yang membawa Tiongkok mengambil keputusan untuk lebih menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat ketimbang tindakan lainnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok akan dibahas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin.

5.1 *Decision maker*

Decision maker, merupakan perilaku pengambilan keputusan yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sebuah negara mengambil keputusan luar negerinya. Faktor ini menjelaskan mengenai bagaimana seorang pengambil keputusan dalam mengambil keputusan politik luar negeri negerinya. Menurut Coplin faktor ini akan mempengaruhi proses

¹¹⁹ Loc.cit Xianwen. Hlm: 2

pengambilan keputusan, begitu pula dengan pengambilan keputusan sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel.

5.1.1 Pengaruh Seorang Pengaruh Keputusan

Proses pembuatan keputusan politik luar negeri tentunya tidak lepas dari adanya seorang pengambilan keputusan. Seorang pengambilan keputusan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah manusia. Coplin berpendapat bahwa manusia merupakan pemecah masalah yang rasional untuk memproses secara intelektual penyusunan politik luar negeri.¹²⁰ Yang dalam kasus ini seorang pengambil keputusan adalah Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

Tiongkok mengalami masa transisi kepemimpinan pada november 2012, yang kemudian membawa perubahan signifikan bagi Tiongkok dibidang kebijakan luar negeri. pada tahun 2012, dengan Xi Jinping sebagai pemimpin baru, yang membawa Tiongkok lebih tegas dalam urusan hubungan internasional.¹²¹ Beberapa berpendapat bahwa perilaku internasional Tiongkok dengan pemimpinnya yang baru, merupakan manifestasi dari fase baru kebijakan luar negeri Tiongkok yang kemudian dikenal sebagai “*peaceful rise 2.0*”.¹²² Xi Jinping sangat aktif dalam melakukan hubungan luar negeri Tiongkok, bahkan seminggu setelah dirinya menjabat menjadi presiden, Xi melangsungkan kunjungan luar negeri ke beberapa negara seperti Russia, dan Tanzania. Xi Jinping juga menghadiri *BRICS Summit* (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) yang dilangsungkan di Afrika Selatan.¹²³

¹²⁰ Loc.cit Coplin. Hlm: 4

¹²¹ Jian Zhang. 2015. “ *China’s new foreign policy under Xi Jinping: towards ‘Peaceful Rise 2.0’?*” dalam *Global Change, Peace and Security* 2015 vol. 27, no. 1, 5-19. University of New South Wales: Canberra, Australia.

¹²² Ibid. Hlm: 5

¹²³ Ibid. Hlm: 7

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok menjadi negara yang terbuka terhadap masalah-masalah internasional. Tiongkok menjadi negara yang sedikit demi sedikit ikut campur ke dalam level global. Pidato Xi Jinping dalam kongres partai yang ke 19, Xi Jinping menyebutkan

“a new historic juncture in China’s development... an era that sees China moving closer to center stage and making greater contributions to mankind.”¹²⁴

Dalam pidatonya itu, Xi Jinping Ingin Tiongkok lebih berkontribusi terhadap sosial masyarakat dan menjadikan Tiongkok sebagai pusat sistem internasional. Tidak hanya keinginannya untuk terlibat dalam masalah-masalah global, Xi Jinping juga memikirkan stabilitas regional.

Ide mengenai stabilitas regionalnya tersebut dibawa dalam inisiatif diplomasi yang salah satunya adalah *“community of common destiny”* (*mingyun gongtongti*) yang dibuat untuk memebangun hubungan Tiongkok dengan berbagai negara secara luas, dan hubungannya dengan negara tetangga pada khususnya.¹²⁵ Istilah tersebut pertama kali dipakai oleh Presiden Hu Jintao, yang muncul dalam 2011 *white paper on peaceful development*, yang mengacu pada hubungan yang saling bergantung satu sama lain antara negara-negara dengan sistem politik yang berbeda dan pada tingkat perkembangan yang berbeda di era globalisasi ekonomi.¹²⁶ Xi menggunakan istilah tersebut dalam pidato pertamanya yang diadakan dalam pertemuannya bersama kelompok ahli luar negeri yang bekerja di Tiongkok. yang sejak saat itu Xi terus mengulang istilah tersebut dalam berbagai kesempatan.

¹²⁴ Ibid, hlm: 4

¹²⁵ Ibid, hlm: 17

¹²⁶ Ibid. Hlm: 17

Xi Jinping sendiri merupakan orang yang telah lalu-lalang dalam dunia perpolitikan Tiongkok. Ia merupakan Sekretaris Jendral *Chinese Communist Party* (CCP), yang merupakan partai terbesar dan yang paling berkuasa di Tiongkok. Dalam nasional kongres CCP, suara bulat kongres menyetujui laporan Xi Jinping sebagai mandat resmi partai dan diabadikan dalam konstitusi partai, yang kemudian disebut sebagai “*Xi Jinping Thought*”.¹²⁷ Yang berarti partai memberi Xi Jinping otoritas, yang tidak tertandingi oleh pemimpin Cina sejak Mao Zedong.¹²⁸

Pengaruh Xi Jinping telah terlihat bahkan sebelum menduduki kursi presiden, yang ia tunjukkan melalui partisipasinya menyusun kebijakan Tiongkok terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Tiongkok menjajikan lebih dari 20 miliar dollar bantuan ke negara-negara Asia Tenggara, yang akan memberikan puluhan miliar dollar lebih dalam pembiayaan infrastuktur ke wilayah itu, dan secara pribadi dipimpin oleh Xi Jinping.¹²⁹ Gerakan-gerakan *soft power* yang datang ditengah-tengah langkah agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan, membuktikan bahwa Tiongkok berusaha menunjukkan manfaat kerjasama melawan latar belakang mencolok dari potensi konflik.¹³⁰ Dan membuktikan bahwa Tiongkok tidak hanya menggunakan cara agresif untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Yang sangat membedakan Xi Jinping dengan pemimpin Tiongkok yang lain adalah kesediaannya untuk menggunakan instrumen negara, dari aset militer hingga intimidasi ekonomi, serta imbalan ekonomi yang ditunjukkan secara eksplisit untuk mengejar

¹²⁷ William C. Mccahill JR. 2017. *China's 'New Era' and 'Xi Jinping Thought'*. The National Bureau of Asian Research: commentary. Diakses melalui: http://www.nbr.org/downloads/pdfs/outreach/mccahill_commentary_102417.pdf

¹²⁸ Ibid, hlm: 1.

¹²⁹ Ibid, hlm: 16.

¹³⁰ Ibid, hlm: 16.

berbagai tujuan politiknya.¹³¹ Meskipun Tiongkok telah menggunakan instrument geoekonomi selama lebih dari 15 tahun, kepemimpinan saat ini lebih mengandalkan kekayaan, dan menunjukkan kepentingannya secara tegas untuk secara bersamaan mendorong kerjasama dengan menghukum secara keras. Namun secara umum, kebijakan Xi Jinping dicirikan oleh penindasan atas isu-isu teritorial dan lebih selektif pada masalah-masalah ekonomi, dengan mengaplikasikan sanksi ekonomi lebih sering dari pemimpin-pemimpin sebelumnya.¹³²

Namun ditengah keterbukaan politik luar negerinya, Tiongkok masih merupakan negara dengan sistem politik yang tertutup. Hal ini ditandai dengan ada satu partai yang dominan yaitu CCP. Sistem politik tertutup yang dianut oleh Tiongkok membuat Xi Jinping sebagai Kepala negara memiliki otoritas “*ultimate decision*”, yang mana keputusan yang dikeluarkannya tidak bisa diganggu gugat.¹³³ Selain itu Xi Jinping juga merupakan pemimpin yang paling *powerful* sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping. Dengan otoritasnya yang melampaui batas, Xi Jinping mengakhiri kepemimpinan kolektif dan konsesual yang telah dilakukan oleh Tiongkok, Ia memarjinalkan birokrasi dan menempatkan dirinya sebagai pusat pembuatan keputusan pada semua hal yang penting.¹³⁴

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa seorang pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah presiden Xi Jinping adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Tiongkok dalam mengambil keputusan untuk memberikan sanksi kepada Korea Selatan. Posisi Xi Jinping sebagai Presiden, yang memiliki otoritas penuh dalam mengambil keputusan politik luar negeri Tiongkok, telah membentuk perilaku politik luar negeri

¹³¹ Robert D. Blackwill dan Kurt M. Campbell. 2016. “*Xi Jinping on the Global Stage*”. Council of Foreign Relations: Council Special Report No. 74.

¹³² Ibid, hlm: 16.

¹³³ Silvia Menegazzi. Op,cit hlm: 10

¹³⁴ Blackwill dan Campbell, Op. cit hlm: 3

Tiongkok sebagai sebuah negara. Sehingga dalam negara dengan sistem politik tertutup, yang dalam hal ini merupakan Tiongkok, seorang Presiden sebagai pengambil keputusan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk keputusan maupun kebijakan politik luar negeri sebuah negara. Selain itu faktor ini sangat berpengaruh dilihat dari pola pengambilan keputusan, yang bisa dilihat perilaku politik Xi Jinping yang mengandalkan ekonomi sebagai alat politik luar negeri, juga merupakan pengaruh yang membawa Tiongkok cenderung memberikan sanksi ekonomi kepada negara lain, ketimbang mengeluarkan keputusan yang bukan menjadi ciri khasnya.

5.2 *Economy and Military Factors*

Faktor ekonomi dan militer merupakan faktor yang berkaitan satu sama lain, yang menyangkut kondisi ekonomi dan militer dalam negeri. Di dalam bukunya, Coplin menjelaskan sejarah perkembangan kondisi ekonomi dan militer negara, yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana sektor ekonomi dan militer saling berkaitan. Coplin menjelaskan bahwa seorang pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuan dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya dan negaranya, yang dikaitkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer.¹³⁵ Oleh karena itu kondisi ekonomi dan militer sebuah negara akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang pengambil keputusan dalam menentukan politik luar negeri. Seperti yang dikemukakan Coplin, dalam kasus ini faktor ekonomi akan diukur ke dalam dua indikator, yaitu: (1) kapasitas produksi barang dan jasa; (2) kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional.

5.2.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa

Pada variabel ini Coplin menjelaskan bahwa negara yang dapat memenuhi kapasitas produksi barang dan jasanya merupakan negara yang berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan negara, maka

¹³⁵ Loc.cit William D. Coplin. Hlm: 110

semakin besar kemungkinan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Coplin berpendapat bahwa negara yang tingkat industrinya tinggi cenderung memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga jumlah GNP (*Gross National Product*) dapat melihat seberapa tinggi kondisi ekonomi sebuah negara.

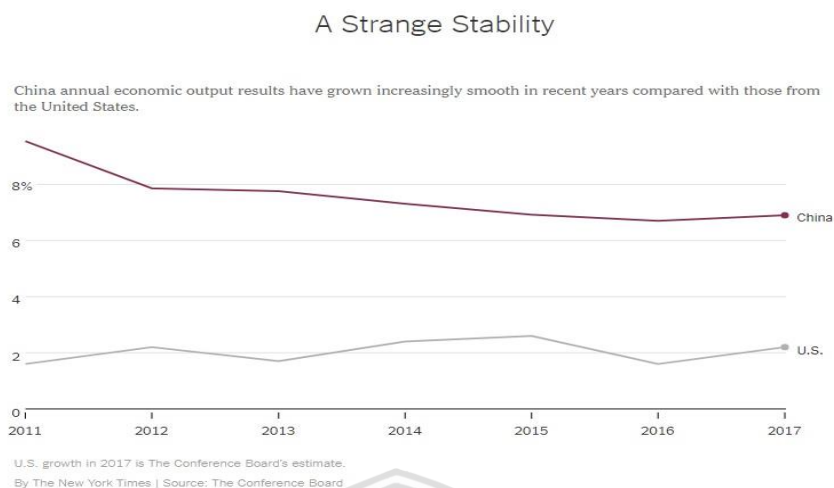
Tiongkok merupakan negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yang ekonominya lebih besar dari Jepang dan Jerman dalam hal *Purchasing Power Party* (PPP) yang memperhitungkan nilai komparatif uang diberbagai negara. Tiongkok sudah memiliki ekonomi terbesar di dunia.¹³⁶ Tiongkok merupakan negara kedua terkaya diantara negara-negara yang tergabung dalam G-20, dan satu-satunya negara didunia yang dapat memimpin perekonomian.¹³⁷ Pada tahun 2013 dimasa pemerintahan Tiongkok yang baru, Xi Jinping tidak mengadakan reformasi ekonomi yang signifikan. Xi memusatkan kekuasaannya, menggulingkan musuh-musuh politik internal, dan mendukung kebijakan otoriter untuk memperketat kontrol masyarakat sipil.¹³⁸

¹³⁶ Anonim. "How China shaping the global economic order?". [online] Diakses melalui: <https://chinapower.csis.org/how-is-china-shaping-the-global-economic-order/>

¹³⁷ Robert D. Blackwill dan Kurt M. Campbell, Op.cit. hlm : 24.

¹³⁸ 2018 Index of economic freedom. Diakses melalui: <https://www.heritage.org/index/country/china>

Gambar 2: Perbandingan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan AS¹³⁹



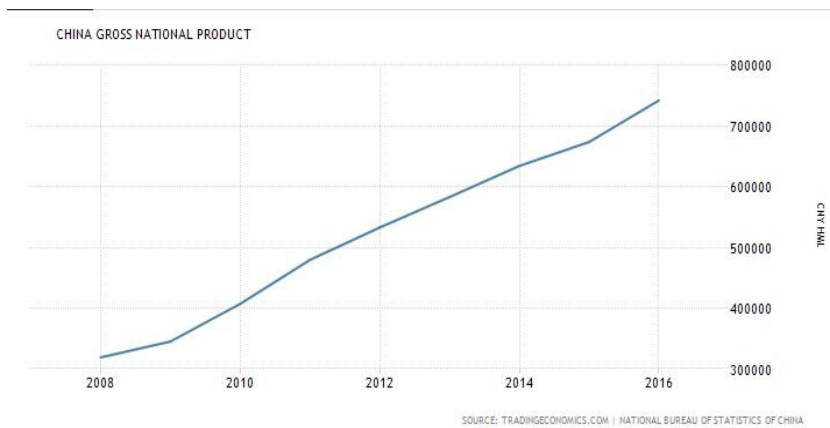
Dalam grafik tersebut dapat lihat bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok yang menjadi dua negara terbesar dunia saling melampaui satu sama lain. Namun perkembangan grafik *annual growth* Tiongkok dinilai lebih stabil dibandingkan negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat dan lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Pendapatan nasional perkapita juga meningkat ditahun dari tahun 2013-2015, hal ini dapat dilihat dari *Gross National Product* (GNP). GNP adalah nilai pendapatan barang dan jasa sebuah negara yang dihasilkan oleh warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.¹⁴⁰ Berikut ini adalah grafik GNP Tiongkok dari tahun 2008-2016:

¹³⁹ KEITH BRADSHER. 2018. "China 'growth looks strong. Maybe economic too strong.'" Dalam The Newyork Times [online] Diakses melalui: <https://www.nytimes.com/2018/01/18/business/china-gdp-economytoo-growth.html>

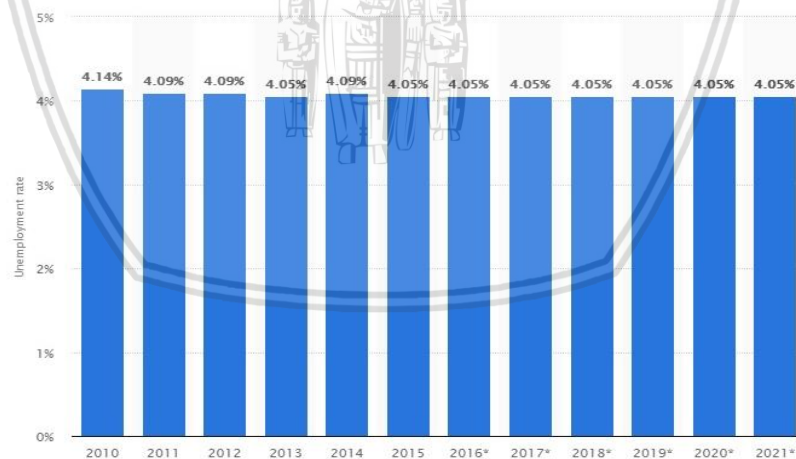
¹⁴⁰ Kimberly Amadeo. "Gross National Product and its Differences from Gross Domestic Product". Diakses melalui: <https://www.thebalance.com/what-is-the-gross-national-product-3305847>

Gambar 3: Grafik GNP Tiongkok tahun 2008-2016¹⁴¹



Pada grafik tersebut diatas terlihat bahwa pendapatan negara Tiongkok yang dihitung dari GNP terus meningkat. Pada tahun 2015, GNP Tiongkok yang merupakan pendapatan nasional hampir mencapai 675.000 CNY. Berarti hal tersebut membuktikan bahwa jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan Tiongkok meningkat setiap tahunnya.

Gambar 4: tingkat pengangguran Tiongkok pada tahun 2010-2015¹⁴²



Gambar grafik diatas merupakan tingkat pengangguran di Tiongkok mulai tahun 2010 dan prediksi tingkat pengangguran hingga 2021. Grafik tersebut juga menunjukkan

¹⁴¹ "china gross national product"[online]. Diakses melalui: <https://tradingeconomics.com/china/gross-national-product>

¹⁴² China unemployment rate[online]. Diakses melalui: <https://www.statista.com/statistics/270320/unemployment-rate-in-china/>

bahwa tingkat pengangguran di Tiongkok stabil. Yang berarti pengangguran tidak terus bertambah. Data-data diatas menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan negara yang terus besar dan terus berkembang.

Dengan besar pendapatan masing-masing penduduknya yang demikian, Tiongkok dinilai sebagai negara yang telah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Terlebih lagi peringkat Tiongkok yang tergolong tinggi dibandingkan negara lainnya, terutama dari Korea Selatan. Sehingga dengan keadaan ekonomi yang mumpuni Tiongkok dapat dengan mudah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara yang tidak sepaham dengannya, dalam hal ini adalah Korsel.

Sedangkan Korsel sendiri merupakan negara yang perekonomiannya banyak bergantung dengan perdagangan luar negerinya, terutama dari Tiongkok. Tiongkok menjadi partner dagang nomor satu bagi Korsel. Dengan demikian, jika Tiongkok kemudian memutus tali dagang dengan Korsel, Korsel akan kehilangan sumber pendapatannya. Dan hal tersebut membuat Korsel akan menyesuaikan tindakan luar negerinya dengan kepentingan nasional Tiongkok. Dengan pemikiran yang demikian, kemungkinan Tiongkok menjatuhkan keputusan untuk melaksanakan sanksi ekonomi kepada Korsel akan semakin besar.

Berdasarkan kondisi ekonomi dalam negeri Tiongkok tersebut, kita dapat melihat bahwa Tiongkok merupakan negara yang menanggung hutang yang besar, hingga negara harus mengeluarkan cadangan ekonominya. Dalam upaya mengatasi hutang tersebut Tiongkok membuka ekspor, agar pendapatannya dapat menutupi hutang. Namun hal tersebut tidak serta merta mendukung keputusan Tiongkok memilih sanksi ekonomi sebagai jalan keluar.

Dalam hal ini penulis tidak menemukan data yang berkaitan langsung antara hutang yang ditanggung dengan pemberian sanksi ekonomi oleh Tiongkok kepada Korsel. Coplin berpendapat bahwa negara akan mengambil langkah-langkah tertentu ketika negaranya berada dalam kesulitan pembayaran hutang luar negeri, yang salah satunya adalah dengan mengekang pengeluaran luar negeri.¹⁴³ Namun dalam kasus ini tidak ada tindakan dari pemerintah Tiongkok yang berindikasi untuk mengekang pengeluaran luar negeri. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung pemerintah Tiongkok dalam mengambil keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017.

5.2.3 Kebergantungan Pada Perdagangan dan Finansial Internasional

Indikator kedua yang dapat menentukan kekuatan dan kelemahan ekonomi suatu negara adalah kebergantungan negara pada perdagangan dan finansial internasional. Menurut Coplin kekuatan dan kelemahan sebuah negara dapat dilihat bagaimana sebuah negara dapat mengatasi kesulitannya dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dengan membayar hutang-hutang luar negerinya, sehingga negara tersebut tidak harus mengeluarkan cadangannya. Dalam hal ini penulis akan melihat kebergantungan Tiongkok pada hubungan perekonomiannya dengan negara lainnya, melalui besarnya jumlah ekspor-impor Tiongkok pada tahun 2013-2016.

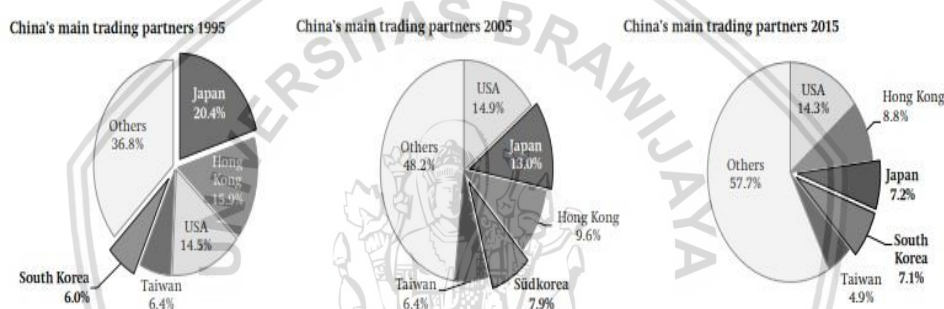
Tiongkok mulai bergabung dengan *World Trade Organizations* (WTO) pada tahun 2001, hal ini membuktikan bahwa Tiongkok mulai membuka jalur perdagangannya kepada internasional. Hubungan ekonomi Tiongkok dan Korsel sangat erat walaupun terlambat 20 tahun dibandingkan hubungan Tiongkok dengan Jepang. Setelah normalisasi, pada tahun 1992 Tiongkok dan Korsel mulai mengakui

¹⁴³ Loc.cit Coplin. Hlm:124

hubungan diplomatik keduanya.¹⁴⁴ Tiongkok, Korsel bersama dengan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang dekat, namun hubungan ekonomi yang dekat tidak membuat negara-negara tersebut saling ketergantungan.

Daripada hubungan yang saling bergantung, Tiongkok, Korsel dan Jepang lebih melihat satu sama lain sebagai kompetitor. Tiongkok secara bertahap mendaki kepuncak rantai perdagangan internasional untuk mengejar ketinggalan, yang pada akhirnya menyusul Jepang dan Korea disektor-sektor individu.¹⁴⁵

Gambar 5: Hubungan Perdagangan Tiongkok, Jepang, dan Korsel Tahun 1995-2015¹⁴⁶



Dalam grafik tersebut kita dapat lihat bahwa Tiongkok tidak menggantungkan perdagangannya pada Jepang dan Korsel, yang terlihat lebih besar nilai perdagangannya pada negara lain selain Korsel dan Jepang. Sehingga membuat kedua negara tersebut bukan negara yang menjadi tujuan utama perdagangan internasional Tiongkok sejak tahun 1995. Namun pada akhir awal tahun, ketiga negara tersebut memutuskan untuk saling bekerjasama.

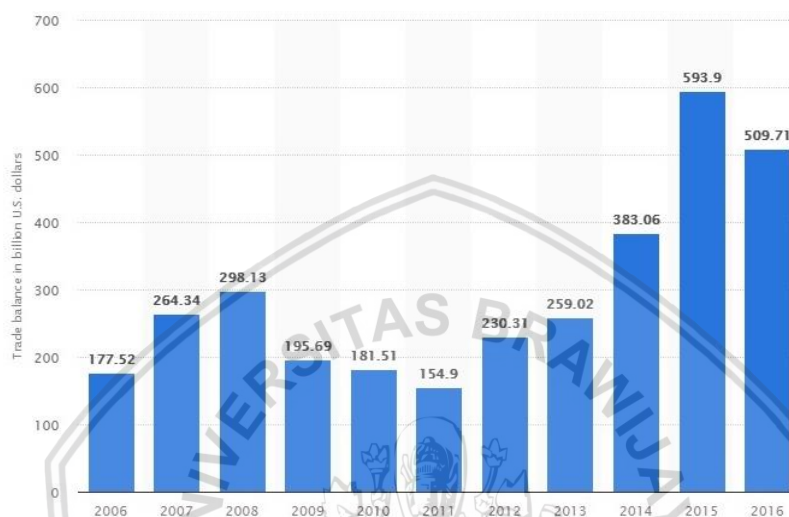
¹⁴⁴ Alexandra Sakaki and Gudrun Wacker. 2017. "China-Japan- South Korea: A Tense Ménage à Trois" dalam SWP Research Paper. German Institute for International and Security Affairs: Berlin.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Ibid.

Pada masa transisi kepemimpinan, Tiongkok mengalami fluktuasi perdagangan yang signifikan. Perdagangannya mengalami surplus mencapai 56.7% dari tahun sebelumnya.

Gambar 6: Fluktuasi Perdagangan Tiongkok Mulai Tahun 2006-2016 (dalam satuan miliar USD)¹⁴⁷



Yang menjadikan Tiongkok sebagai negara kedua dengan ekonomi terbesar di dunia setelah AS. Namun, pada tahun 2015, ekspor-impor Tiongkok mengalami penurunan dengan total volume 24.59 triliun CNY.¹⁴⁸ Menurut *General Administration Custom* Tiongkok ekspor Tiongkok menurun sebesar 4,4% diangka 14.14 triliun CNY, sedangkan jumlah impor juga menurun sebesar 20,4% pada tahun 2015 sebesar 10.45 triliun CNY.¹⁴⁹ Namun demikian Tiongkok masih menduduki negara kedua dengan jumlah ekspor-impor terbesar setelah AS.

Disamping pendapatannya melalui ekspor-impor, Tiongkok juga menanggung hutang luar negeri yang besar. Pada tahun 2015, total hutang Tiongkok adalah dua

¹⁴⁷ "China trade balance from 2006-2016"[online]. Diakses melalui:

<http://www.statista.com/statistics/263646/trade-balance-china/>

¹⁴⁸ "China sees export and import volume fall 7% in 2015"[online]. Diakses melalui:

http://www.china.org.cn/business/2016-01/13/content_37566257.htm

¹⁴⁹ Jiang Xueqing and Yang Ziman. "China sees total export and import volume 7% in 2015"[online]. Diakses melalui: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/13/content_23064441.htm

kali lipat dari jumlah GDP nasionalnya. Hutang negara mengembang hampir 250% dari total GDP, pinjaman Tiongkok mencapai 168.48 triliun yuan diakhir tahun 2015.¹⁵⁰ Hutang tersebut dihasilkan oleh *state-owned enterprises* (SOEs) atau perusahaan milik negara, dan hutang tersebut kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah lokal Tiongkok.¹⁵¹ Hal yang paling mengkhawatirkan terletak pada sektor kooperasi *non-financial*, yang pada akhirnya dapat memicu resiko sistemik karena banyak perusahaan milik negara yang meminjam dari bank-bank pemerintah.

Menurut Coplin kondisi ini termasuk klasifikasi negara menurut masalah-masalah yang dihadapi dalam menghindari neraca pembayaran yang tidak menguntungkan. Dan dalam hal ini Tiongkok termasuk kedalam kelompok negara keempat, yang terdiri atas negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran akibat keterlibatannya dalam kegiatan luar negeri.¹⁵² Walaupun pendapatan ekspornya tinggi, namun kegiatan luar negeri seperti investasi yang besar, bantuan luar negeri dan komitmen militer, membuat negara mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang.

Berdasarkan kondisi ekonomi dalam negeri Tiongkok tersebut, kita dapat melihat bahwa Tiongkok merupakan negara yang menanggung hutang yang besar, hingga negara harus mengeluarkan cadangan ekonominya. Dalam upaya mengatasi hutang tersebut Tiongkok membuka ekspor, agar pendapatannya dapat menutupi hutang. Namun hal tersebut tidak serta merta mendukung keputusan Tiongkok memilih sanksi ekonomi sebagai jalan keluar.

¹⁵⁰ Larry Elliot. "China's debt is 250% of GDP and 'could be fatal', says government expert" [online] diakses melalui: <https://www.theguardian.com/business/2016/jun/16/chinas-debt-is-250-of-gdp-and-could-be-fatal-says-government-expert>

¹⁵¹ Kamal Ehmed. "china's debt mountain: should we worry?" [online]. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/business-40029092>

¹⁵² Op.cit William D. Coplin. Hlm: 123

Dalam hal ini penulis tidak menemukan data yang berkaitan langsung antara hutang yang ditanggung dengan pemberian sanksi ekonomi oleh Tiongkok kepada Korsel. Coplin berpendapat bahwa negara akan mengambil langkah-langkah tertentu ketika negaranya berada dalam kesulitan pembayaran hutang luar negeri, yang salah satunya adalah dengan mengekang pengeluaran luar negeri.¹⁵³ Namun dalam kasus ini tidak ada tindakan dari pemerintah Tiongkok yang berindikasi untuk mengekang pengeluaran luar negeri. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung pemerintah Tiongkok dalam mengambil keputusan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017.

5.2.3 Kapasitas Penggunaan Militer

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kemampuan ekonomi dan militer negara saling berkesinambungan satu sama lain. Namun untuk mengukur tingkat kemampuan militer negara, Coplin juga menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan secara akurat untuk mengukur kelemahan dan kekuatan militer. Yang salah satunya adalah kapasitas penggunaan militer negara. Coplin berpendapat bahwa semakin tinggi jumlah GNP suatu negara, maka semakin tinggi pula kemampuan negara untuk menciptakan kekuatan militer, terutama untuk jangka panjang.¹⁵⁴ Dalam indikator ini penulis akan melihat anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok untuk kebutuhan militer pada tahun 2013-2016. Pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan militernya sangatlah penting, hal ini dikarenakan pertahanan negara menjadi bidang yang membuat negara merasa aman dari ancaman negara lain.

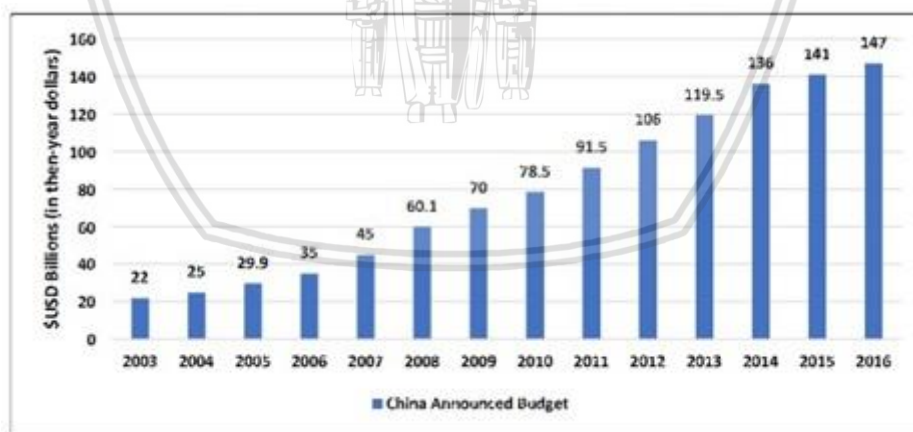
¹⁵³ Loc.cit Coplin. Hlm:124

¹⁵⁴ Op,cit. william D. Coplin. Hlm: 216

Coplin menjelaskan bahwa negara-negara dengan GNP yang tinggi, pada waktu tertentu secara militer mungkin tidak kuat, karena negara tersebut memilih menggunakan kebanyakan sumber daya mereka untuk barang konsumsi alih-alih barang keperluan militer.¹⁵⁵ Namun Tiongkok bukan termasuk negara yang tidak mengeluarkan anggarannya untuk keperluan militer. Hal ini dapat terbukti dengan Tiongkok yang berhasil masuk ke dalam 15 negara dengan pengeluaran terbesar didunia pada tahun 2016, yang mana pada tahun tersebut Tiongkok menduduki peringkat kedua setelah AS dan diikuti Russia serta India.¹⁵⁶ Pada periode tahun 2007-2016, Tiongkok memiliki pertumbuhan dalam pengeluaran untuk kebutuhan militer, yang mana naik sebesar 118%.¹⁵⁷

Pada tahun 2015, Tiongkok menggunakan anggaran untuk pengeluaran kebutuhan militer yang naik sebesar 7,4%.¹⁵⁸

Gambar 7: Trend Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok tahun 2003-2016 (dalam miliar USD)¹⁵⁹



¹⁵⁵ Op,cit William D. Coplin. Hlm: 126

¹⁵⁶ Niall McCharthy. "The Top 15 Countries for Military Expenditure in 2016" [Online]. Diakses melalui: <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/04/24/the-top-15-countries-for-military-expenditure-in-2016-infographic/#7da1f91f43f3>

¹⁵⁷ Nan Tian, dkk. "Trends in world military expenditure, 2016". Sipri Fact Sheet April 2017. Hlm: 2

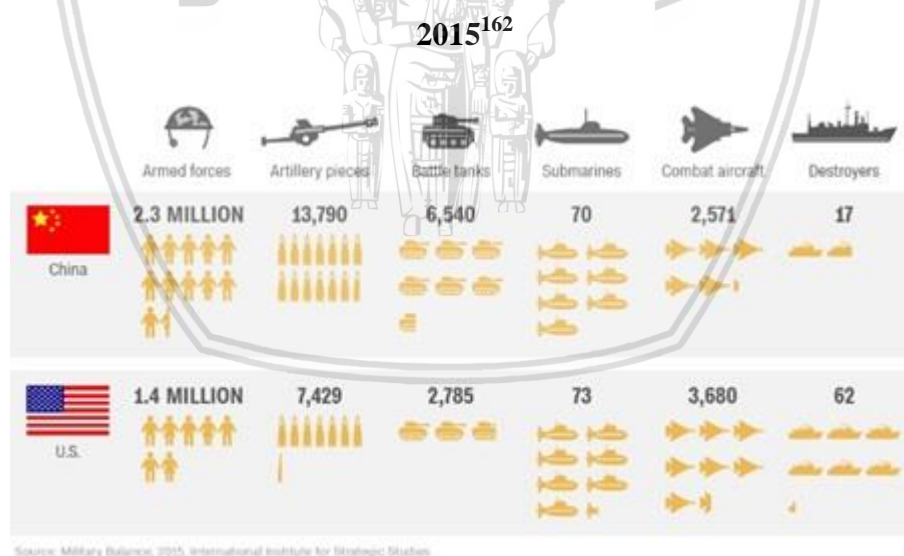
¹⁵⁸ Sam Perlo-Freeman, dkk. 2016. "trends in world military expenditure, 2015". Sipri Factsheet April 2016. Hlm:2

¹⁵⁹ China's defences budget. Diakses melalui: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf

Sedangkan pada tahun 2013, anggaran militer Tiongkok naik sebesar 10,7% pada nilai 114.3 *billion* USD. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan standar kehidupan dan kondisi pelatihan bagi para pasukan, mendukung perkembangan dan kekuatan senjata dan peralatan teknologi tingkat tinggi, dan membawa negara pada kapabilitas militer modern.¹⁶⁰

Seperti yang dikatakan Coplin dalam bukunya, bahwa negara mempunyai kemampuan menghancurkan dan kemampuan mobilitas pasukan.¹⁶¹ Kebanyakan negara memiliki salah satu dari kemampuan tersebut dan Tiongkok merupakan negara dengan kemampuan mobilitas pasukan yang baik. Hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan jumlah pasukan Tiongkok dan AS yang notabene merupakan dua negara yang masuk dalam 5 negara suplier terbesar didunia.

Gambar 8: Perbandingan Jumlah Kapasitas Militer Tiongkok dan AS tahun



Dalam komparasi kapasitas militer antara Tiongkok dan AS tersebut dapat kita lihat bahwa Tiongkok memiliki kemampuan militer yang lebih kuat di wilayah daratan. Hal

¹⁶⁰ Andrew S. Erickson. "China's 2013 military budget to Rise 10.7% to US \$114.3 Billion—What it Means, and Why it Matters". Diakses melalui: <http://www.andrewerickson.com/2013/03/chinas-2013-military-budget-what-it-means-and-why-it-matters/>

¹⁶¹ Op.cit. William D. Coplin. Hlm: 125

¹⁶² KatieHunt and Steven Jiang. "China's military budget to grow at slowest pace in five years"[online]. Diakses melalui: <https://edition.cnn.com/2016/03/04/asia/china-npc-military-budget/index.html>

ini juga dapat dibuktikan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan yang tinggi dalam penyerangan jarak dekat, jika dibandingkan dengan AS.

Dilihat dari anggaran dana dan pengalokasian anggaran militer negara, Tiongkok lebih memprioritaskan kemampuan militer jarak dekat. Hal ini terlihat dari rencana Xi Jinping untuk memperbaharui kemampuan Tiongkok dengan reformasi PLA, yang tercantum pada *China Strategic 2015 White paper*. Keputusan pengalokasian juga merupakan komitmen rakyat, terutama pemerintah Tiongkok untuk mengalihkan sumber daya ekonomi kepada pengembangan kekuatan militer, yang menurut Coplin merupakan syarat utama dalam membangun kapabilitas militer. Sehingga, pengalokasian anggaran militer yang dilakukan Tiongkok, yang lebih cenderung untuk menggunakan kekuatan militer jarak dekat, membuat Tiongkok menghindari keputusan untuk menggunakan militer sebagai respon terhadap tindakan Korsel. Keputusan pengalokasian anggaran tersebut kemudian membuat Tiongkok tidak memiliki kapasitas militer yang serupa dengan Korsel.

Dari data yang tertera diatas, kita dapat melihat bahwa Tiongkok menggunakan kekuatan militer dengan baik. Tiongkok juga tidak segan-segan untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, hal ini berbeda dengan pendapat Coplin yang mengatakan bahwa negara yang memiliki GNP besar lebih cenderung menghabiskan anggaran untuk kebutuhan konsumsi barang lain. Dari fakta tersebut sebenarnya Tiongkok mampu menggunakan kemampuan militer untuk merespon tindakan Korsel yang mengembangkan THAAD. Namun kenyataannya Tiongkok menggunakan cara ekonomi, yang dianggap lebih efektif. Berarti indikator kapasitas penggunaan militer ini tidak dapat menjawab alasan mengapa Tiongkok lebih memilih menggunakan ekonomi koersif, dibandingkan dengan militer. Oleh karena

itu, indikator ini dinilai tidak mempengaruhi keputusan Tiongkok dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi kepada Korsel pada tahun 2016-2017.

5.2.4 Tingkat kebergantungan pada sumber-sumber militer luar negeri.

Pada variabel ini kita akan melihat apakah Tiongkok bergantung pada sumber militer luar negeri. dengan melihat dari adanya aliansi militer dengan Korsel pada tahun 2013-2016. Hal tersebut dapat kita lihat dari kegiatan ekspor-impor antara kedua negara memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan luar negeri Tiongkok kepada Korsel. semakin besar jumlah ekspor-impor antara Tiongkok dan Korsel, maka semakin besar pula kebergantungan kedua negara.

Tiongkok telah menjadi suplier senjata yang melakukan transaksi senjata sejak tahun 1980. Faktor jangkauan menentukan ruang lingkup dan skala penjualan senjata Tiongkok, seperti halnya komoditas lainnya. Penjualan senjata Tiongkok adalah hasil dari kombinasi faktor sisi penawaran dan permintaan. Sisi penawaran Tiongkok termasuk keinginan pemerintah untuk membangun hubungan politik dengan negara penerima, upaya untuk menggunakan negara penerima sebagai penyeimbang lawan yang strategis, dan konsiderasi murni untuk urusan komersial.¹⁶³

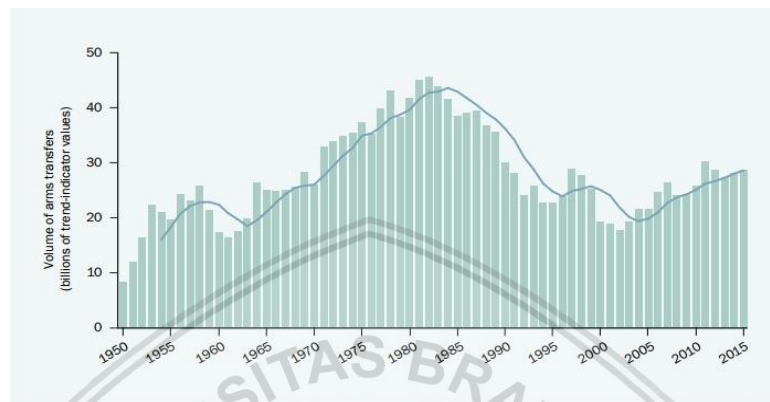
Sejak tahun 2013, nilai ekspor militer Tiongkok telah melampaui akuisisi luar negerinya. Dan antara tahun 2008-2017, Tiongkok mengekspor senjata konvensional yang bernilai 14.4 miliar USD ke seluruh dunia menjadikan dirinya masuk dalam 5 negara pemasok senjata militer terbesar.¹⁶⁴ Volume transfer internasional senjata

¹⁶³ Daniel L. Byman dan Roger Cliff. 1999. "China's arms sales: motivation and implication". Rand: United States. Hlm : 7

¹⁶⁴ China's power[online]. Diakses melalui: <https://chinapower.csis.org/military-spending/>

utama pada tahun 2015 mengalami peningkatan 14% dibandingkan pada tahun 2010-2015 silam.¹⁶⁵

Gambar 9: Grafik Trend Internasional Transfer Senjata Tahun 1950-2015
(dalam miliar volume)¹⁶⁶



Dalam grafik diatas kita dapat melihat bahwa transfer senjata di wilayah internasional pada tahun 2015 sedang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015, Tiongkok berhasil masuk dalam 5 negara ekspor-impor terbesar di dunia. Pada bidang ekspor senjata, Tiongkok menempati peringkat ke-3 setelah AS dan Russia. Ssama halnya dibidang impor senjata, Tiongkok menempati peringkat ke-3 setelah India dan Arab Saudi.¹⁶⁷

Pada periode tahun 2011-2015, Sipri mengidentifikasi 58 negara eksportir senjata utama, dan 5 negara eksportir terbesar tersebut bertanggung jawab atas pasokan 74% dari jumlah total ekspor senjata didunia.

¹⁶⁵ Aude Fleurant, dkk. 2017. "Trends in International arms transfer, 2015". Sipri Factsheet: Februari 2016.

Hlm: 1

¹⁶⁶ Ibid. Hlm: 1

¹⁶⁷ Ibid. Hlm: 3-5

Tabel 2: Peringkat Negara Ekspor Senjata Beserta Negara pemasok dan Negara Penerima Tahun 2015 (dalam satuan desimal)¹⁶⁸

Exporter	Share of international arms exports (%)		Main clients (share of exporter's total exports %), 2011–15		
	2011–15	2006–10	1st	2nd	3rd
USA	33	29	Saudi Arabia (9.7)	UAE (9.1)	Turkey (6.6)
Russia	25	22	India (39)	China (11)	Viet Nam (11)
China	5.9	3.6	Pakistan (35)	Bangladesh (20)	Myanmar (16)
France	5.6	7.1	Morocco (16)	China (13)	Egypt (9.5)
Germany	4.7	11	USA (13)	Israel (11)	Greece (10)
UK	4.5	4.1	Saudi Arabia (46)	India (11)	Indonesia (8.7)
Spain	3.5	2.6	Australia (29)	Saudi Arabia (12)	Turkey (8.7)
Italy	2.7	2.1	UAE (10)	India (8.8)	Turkey (8.2)
Ukraine	2.6	1.9	China (26)	Russia (12)	Ethiopia (9.2)
Netherlands	2.0	3.0	Morocco (17)	Jordan (12)	USA (7.7)

Tabel 3: Peringkat Negara Impor Senjata Beserta Negara Pemasok dan Negara Penerima Tahun 2015 (dalam satuan desimal)¹⁶⁹

Importer	Share of international arms imports (%)		Main suppliers (share of importer's total imports %), 2011–15		
	2011–15	2006–10	1st	2nd	3rd
India	14	8.5	Russia (70)	USA (14)	Israel (4.5)
Saudi Arabia	7.0	2.1	USA (46)	UK (30)	Spain (5.9)
China	4.7	7.1	Russia (59)	France (15)	Ukraine (14)
UAE	4.6	3.9	USA (65)	France (8.4)	Italy (5.9)
Australia	3.6	3.3	USA (57)	Spain (28)	France (7.2)
Turkey	3.4	2.5	USA (63)	South Korea (9.5)	Spain (8.9)
Pakistan	3.3	4.3	China (63)	USA (19)	Italy (4.6)
Viet Nam	2.9	0.4	Russia (93)	Ukraine (2.6)	Spain (0.9)
USA	2.9	3.6	Germany (21)	Canada (11)	Norway (8.1)
South Korea	2.6	5.7	USA (80)	Germany (13)	Sweden (2.2)

Pada tahun 2015, kegiatan ekspor senjata Tiongkok meningkat sebanyak 88% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pada masa ini Tiongkok memasok senjata utama ke 37 negara.¹⁷⁰ Sedangkan pada bidang impor, Tiongkok mengalami penurunan sebesar 25% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun walaupun demikian, Tiongkok masih masuk dalam 5 negara importir terbesar, karena Tiongkok

¹⁶⁸ Ibid. Hlm: 2

¹⁶⁹ Ibid. Hlm: 4

¹⁷⁰ Ibid. Hlm: 3

masih harus memperhitungkan beberapa komponen seperti transportasi aircraft dan helikopter, komponen mesin untuk aircraft, serta mesin dan kapal.¹⁷¹

Pada tabel diatas kita dapat melihat bahwa Korsel bukanlah negara tujuan Tiongkok untuk melakukan kegiatan jual beli senjata. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa makin bergantung suatu negara pada sumber militer luar negeri untuk menunjang kekuatan angkatan bersenjatanya, maka semakin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar.¹⁷² Menurut Coplin, negara importer memiliki kecenderungan lebih besar dalam kebergantungan akan pasokan senjata. Karena perlengkapan militer lebih dari sekedar pengadaan perlengkapan itu sendiri, namun juga menyangkut pengadaan suku cadang, pemeliharaan dan penggunaan penasihat asing untuk menggunakan perlengkapan militer yang tepat. Oleh karena itu negara importir bergantung pada negara pemasok senjata untuk memenuhi senjata siap pakai. Sedangkan negara eksportir dinilai lebih dapat mengontrol negara pembeli, walaupun negara ekspor masih harus bergantung pada negara lain mengenai pengadaan bahan mentah dan dukungan logistik.

Tiongkok merupakan negara importir senjata, Tiongkok merupakan negara pemasok senjata terbesar yang bertanggung jawab atas pasokan senjata di 37 negara. Oleh karena itu, kontrol Tiongkok terhadap persediaan senjata lebih besar dibandingkan kebutuhannya terhadap kelengkapan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok bukan negara yang rawan dengan kendala-kendala internasional, karena Tiongkok tidak bergantung pada negara lain untuk menunjang kekuatan angkatan bersenjatanya. Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Tiongkok tidak memiliki kebergantungan terhadap sumber militer luar negeri.

¹⁷¹ Ibid, hlm: 6

¹⁷² Op,cit William D. Coplin. Hlm: 127

Pada indikator ini, faktor militer tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat kebergantungan militer Tiongkok pada sumber-sumber militer luar negeri, dan bahkan tidak terlihat Tiongkok memiliki transaksi militer dengan Korsel. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung faktor militer untuk mempengaruhi keputusan Tiongkok untuk lebih memilih memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel daripada menggunakan cara yang lain.

5.2.5 Ketidakstabilan Internal dan Kemampuan Militer

Pada indikator ini kemampuan militer negara yang mumpuni adalah peran militer yang dapat melindungi negara dari serangan negara lain, maupun untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik dalam negeri. Kemampuan militer negara yang demikian penting untuk melindungi rezim pemerintah dan untuk menghindarinya dari kehancuran.¹⁷³ Tanpa militer yang kuat, sebuah negara tidak akan bisa aman maupun kuat. Maka dari itu, prinsip militer yang sejalan dengan rezim pemerintahan akan menjadikan negara tersebut aman dari ancaman dan serangan. Oleh karena itu penting pula bagi militer Tiongkok untuk mengikuti rezim pemerintah.

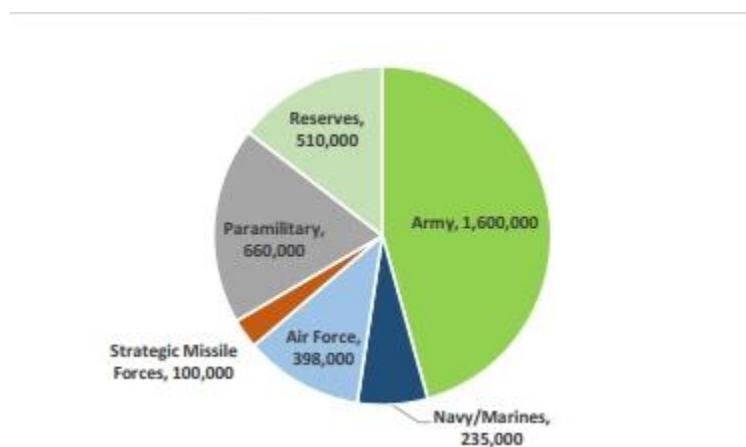
Chinese People's Liberation Army (PLA) merupakan bagian dari pasukan bersenjata milik Tiongkok, yang dibentuk di daerah Nanchang, Provinsi Jiangxi pada 1 Agustus 1927.¹⁷⁴ PLA terdiri dari *PLA Army* (PLAA), *PLA Navy* (PLAN), *PLA Air Forces* (PLAAF), dan *PLA Rocket Forces* (PLARF), yang pada tahun 2015 berjumlah 2 juta pasukan.¹⁷⁵

¹⁷³ Op,cit William D. Coplin. Hlm: 129

¹⁷⁴ Defense Intelligence Agency. 1984. "*Handbook of The Chinese People's Liberation Army*". Departement of Defence Interlligence: Washington DC. Hlm: 1

¹⁷⁵ Edward Wong, dkk. "*China Announces Cuts of 300.000 troops at Military Parade Showing Its Might*" [online]. Diakses melalui: <https://www.nytimes.com/2015/09/03/world/asia/beijing-turns-into-ghost-town-as-it-gears-up-for-military-parade.html>

Gambar 10: Jumlah Personil PLA dalam Masing-Masing Angkatan¹⁷⁶



Pada *China Strategic 2015 White paper*, terdapat beberapa tugas yang akan dilaksanakan PLA untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah tugas-tugas PLA tersebut¹⁷⁷:

1. Untuk menyelesaikan keadaan darurat dan ancaman militer yang luas, menjaga secara efektif kedaulatan dan keamanan teritorial darat, udara dan laut Tiongkok.
2. Dengan tegas melindungi unifikasi tanah air
3. Melindungi keamanan dan kepentingan Tiongkok di wilayah baru.
4. Melindungi keamanan dan kepentingan luar negeri Tiongkok
5. Untuk mempertahankan strategi dan melakukan serangan balik nuklir
6. Untuk berpartisipasi dalam kooperasi keamanan regional dan internasional, dan mempertahankan perdamaian dunia.

¹⁷⁶ Anthony H. Cordesman dan Joseph Kendall. 2016. "2015 white paper defense dalam CSIS: Chinese Strategy and Military Modernization in 2016". Center for Strategic and International Studies. Hlm: 34

¹⁷⁷ Ibid, hlm: 3

7. Untuk memperkuat upaya dalam operasi melawan infiltrasi, separatisme dan terorisme, serta untuk menjaga keamanan politik dan kemampuan sosial Tiongkok.
8. Untuk melakukan tugas seperti penyelamatan darurat dan bantuan bencana, perlindungan hak dan kepentingan, tugas jaga, dan dukungan untuk pembangunan ekonomi sosial nasional.

8 tugas tersebut tercantum dalam strategi yang akan dilakukan oleh Tiongkok hingga masa yang akan datang. Tugas tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan PLA sebagai pasukan bersenjata di Tiongkok. White paper pertahanan tersebut dirilis pada Mei 2015, yang mana hal tersebut adalah pembaharuan rutin yang dilakukan 2 tahun sekali sejak tahun 1998.¹⁷⁸

Pada tahun 2015, kepemimpinan tertinggi Tiongkok mengumumkan rencana untuk menginisiasi reformasi PLA yang paling signifikan setidaknya dalam 3 dekade terakhir. PLA memperbaharui strategi tingkat tinggi, rencana dan kebijakan yang mencerminkan niatnya untuk merubah diri menjadi lebih fleksibel dan menjadi pasukan tangguh yang mampu melakukan operasi gabungan yang lebih maju untuk bertarung dan memenangkan *“informationized local wars”*.¹⁷⁹ Reformasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kontrol CCP terhadap militer, menambah kemampuan PLA dalam menjalankan operasi bersama, dan mengimprovisasi kemampuan *fight short-duration*, menghindari intensitas tinggi konflik regional dari tanah air.¹⁸⁰

Reformasi pada tahun 2015 tersebut merupakan reformasi terbesar dalam bidang militer oleh Tiongkok setelah Xi Jinping menjabat sebagai Presiden. CCP sebagai

¹⁷⁸ Op, cit Anthony and Joseph. Hlm: 2

¹⁷⁹ U.S Office of the Secretary of Defense. 2016. “Annual Report to Congress: Military and Security Involving the People’s Republic of China 2016”.

¹⁸⁰ Ibid, hlm: i.

partai terbesar Tiongkok yang menguasai hampir seluruh lembaga pemerintahan Tiongkok, menjadi alasan reformasi tersebut agar bisa mencapai tujuan negara. Pemimpin Tiongkok telah menandai modernisasi PLA sebagai hal penting untuk mencapai status kekuatan besar dan apa yang disebut Presiden Xi Jinping sebagai “*China Dream*”, serta sebagai peremajaan nasional.

Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut maka angkatan bersenjata Tiongkok akan dengan teguh mematuhi prinsip kepemimpinan mutlak CCP, menjunjung tinggi efektifitas tempur sebagai satu-satunya dan standar dasar, melanjutkan tradisi mulia mereka, dan bekerja membangun diri menjadi militer rakyat yang mengikuti perintah CCP, serta dapat berjuang dan menang terlebih lagi dapat menawarkan kinerja yang lebih baik.¹⁸¹ Reformasi militer yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menimbulkan kemakmuran, kekuatan, demokrasi, kemajuan budaya dan harmonisasi pada masyarakat hingga tahun 2049 pada saat Tiongkok merayakan hari jadinya yang ke-100. Mencapai tujuan yang demikian adalah “*China Dream*” untuk membuat Tiongkok menjadi negara yang kuat, dan PLA melaksanakannya.

Dari reformasi militer yang terjadi pada tahun 2015 tersebut kita dapat mengetahui bahwa kekuatan militer Tiongkok bekerja dibawah perintah pimpinan negara, setidaknya dalam beberapa tahun yang akan datang. Hal ini kemudian menjadikan faktor ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembuatan keputusan. Reformasi militer yang dilakukan membuat kekuatan militer Tiongkok tunduk pada perintah dan rezim pemerintahannya, yang mana hal ini menjamin adanya stabilitas internal. Selain itu, reformasi tersebut dirancang hingga tahun 2049 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pun, stabilitas internal akan tetap terjamin.

¹⁸¹ Loc, cit Anthony and Joseph. Hlm: 2

Oleh karena stabilitas internal dan kemampuan militer yang terjamin, maka kemungkinan terjadinya konflik internal bahkan kehancuran pemerintahan sangat kecil. Militer yang mendukung rezim pemerintah mempengaruhi pembuat keputusan untuk lebih berani mengambil keputusan luar negeri, karena dengan militer yang mendukung pemerintah maka militer tersebut juga telah siap dengan resiko dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kondisi militer dalam negeri Tiongkok yang stabil serta didukung kemampuan militernya yang mendukung rezim pemerintah, menjadikan negara ini sanggup untuk mengeluarkan keputusan yang dengan menggunakan kekuatan militer sebagai alat politik luar negerinya. Namun dalam kasus ini, Tiongkok lebih memilih untuk menggunakan ekonomi sebagai alat politik luar negerinya. Sehingga indikator kondisi stabilitas internal dan kemampuan militer yang mendukung rezim pemerintah tidak dapat menjawab alasan Tiongkok lebih memilih sanksi ekonom sebagai tindakan politik luar negerinya dibandingkan dengan cara yang lain. Oleh karena itu indikator ini tidak mendukung faktor militer untuk mempengaruhi keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 2016-2017.

5.3 International Context

Keadaan internasional menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi negara untuk mengambil suatu keputusan. Dalam variabel ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana indikator ini dapat menjadi alasan untuk mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi keputusan Tiongkok memilih sanksi ekonomi sebagai tindakan politik luar negeri untuk memberikan respon kepada Korsel mengenai pengembangan THAAD. Dalam variabel ini pula penulis akan menjelaskan indikator yang menjadikan international context penting untuk diteliti. Tiga indikator tersebut adalah keterkaitan geografis, hubungan ekonomi, dan hubungan politik dengan negara-negara lain.

5.3.1 Keterkaitan geografis

Letak geografis menjadi salah satu tolok ukur faktor international context atau keadaan internasional sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh Tiongkok. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin, bahwa keputusan geografis merupakan kebutuhan geopolitik yang juga adalah upaya negara untuk memperluas wilayahnya.¹⁸² Perilaku negara dan pengambilan keputusan negara yang berbatasan langsung melalui darat akan berbeda dengan negara yang berbatasan langsung melalui laut. Pada tolok ukur ini, penulis akan menjelaskan kedekatan Tiongkok dengan Korsel melalui pandangan geografis, serta upaya geopolitik yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Korsel.

Tiongkok merupakan negara yang berdiri pada tahun 1949 setelah partai komunis mengalahkan Nationalist Kuomintang.¹⁸³ Luas wilayah Tiongkok adalah 9.596.961 km², dengan letak astronomi antara 18° LU - 54°LU dan 73° BT - 135° BT.¹⁸⁴ Tiongkok terletak di wilayah Asia Timur, yang berbatasan langsung dengan Laut China Timur, teluk Korea, Laut Kuning, dan Laut China Selatan.¹⁸⁵ Tiongkok tidak berbatasan daratan langsung dengan Korsel namun melalui laut, yaitu melalui Laut China Timur dan Teluk Korea. Kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, beberapa kondisi geografis masih merupakan bagian yang konstan dari keputusan-keputusan politik luar negeri.¹⁸⁶

¹⁸² Loc.cit William D. Coplin. Hlm 167

¹⁸³ BBC News. "*China Country Profile*"[online]. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877>

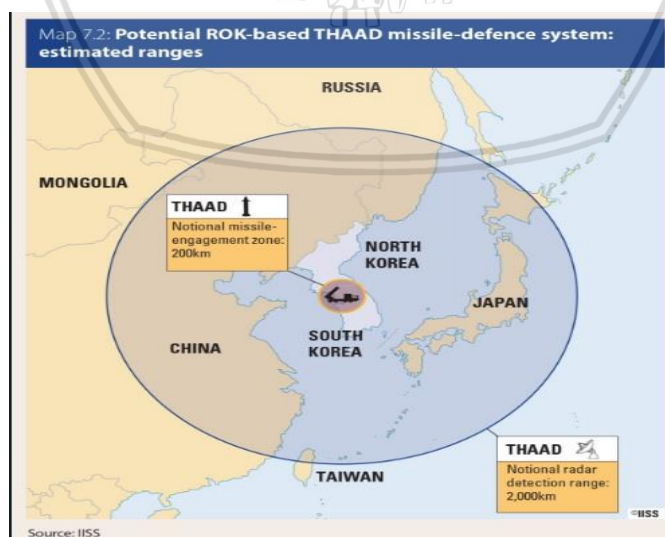
¹⁸⁴ CIA Factbook China [online]. Diakses melalui: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Loc.cit William D. Coplin. Hlm: 167

Gambar 11: gambar Peta Tiongkok¹⁸⁷

Kedekatan geografis tersebut memicu Tiongkok untuk segera mengambil keputusan, hal ini terkait dengan posisi geografis Tiongkok yang merasa terancam akan cara kerja THAAD yang melewati batas. Walaupun tidak berdekatan langsung lewat darat, THAAD yang menurut Korsel dibangun untuk memberikan respon kepada senjata nuklir Korut, memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Tiongkok.

Gambar 12: estimasi jangkauan THAAD¹⁸⁸

¹⁸⁷ China maps. Diakses melalui:

<https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/china/cnsymbols.htm#page>

¹⁸⁸ Anonim. "THAAD covers most major military bases but leaves out Seoul" [online]. Diakses melalui:

<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/thaad-covers-most-major-military-bases-but-leaves-out-seoul>

Dari gambar diatas kita dapat melihat bahwa jangkauan THAAD hingga 2000km, hal tersebut memicu asumsi Tiongkok yang berpendapat bahwa THAAD dapat digunakan oleh Korsel dan AS untuk memata-matai aktivitas militer milik Tiongkok yang rahasia.¹⁸⁹ THAAD diinstalasi oleh Korsel di lapangan luas yang dahulunya digunakan untuk lapangan golf milik Lotte, didaerah Seongju.¹⁹⁰ Pendapat yang dikeluarkan Tiongkok mengenai cara kerja radar THAAD, memperkuat alasannya untuk tidak setuju dengan pengembangan THAAD di Korsel, terutama di wilayah regional Asia Timur.

Dalam bukunya, Coplin juga menjelaskan bahwa kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, beberapa kondisi geografis masih merupakan bagian yang konstan dari keputusan-keputusan politik luar negeri.¹⁹¹ Tiongkok merupakan negara yang termasuk baru dalam memberikan pengaruh pada ranah global. Namun upayanya untuk “memperluas wilayah” sedikit demi sedikit mulai terlihat. Beberapa negara mulai khawatir bahwa kekuatan Tiongkok dapat menyaingi hegemoni AS dengan performa ekonomi Tiongkok yang meningkat sejak tahun 1970 hingga rata-rata naik 10%, yang mana hal tersebut telah melampaui Korsel dan Jepang yang disebut “*economic miracle*”.¹⁹² Hal ini juga sejalan dengan tujuan Xi Jinping sebagai kepala negara, untuk membawa Tiongkok menjadi pusat kegiatan internasional.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka Tiongkok membutuhkan relasi yang baik dengan berbagai negara termasuk Korea. Hubungan yang baik antar negara

¹⁸⁹ Terrell Jermaine Starr. “*Why China’s nervous over South Korea’s new missile Defense System*” [online].

¹⁹⁰ BBC news. “*US anti-missile system operational in South Korea*”[online]. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/world-asia-39775854>

¹⁹¹ Op,cit. hlm: 167

¹⁹² Heungkyu Kim. “*Evolving China’s Foreign Policy in Northeast Asia under Hu Jintao’s Leadership and Implications to Korea-China Realtions*” dalam Paper presenation at a Center for US-Korea Policy Workshop. Institute of Foreign Affairs and National Security. South Korea.

akan sangat menguntungkan bagi kedua negara, dan negara-negara sekitarnya. Korsel menjadi negara yang sangat strategis untuk diajak bekerjasama, apalagi untuk Tiongkok yang baru akan memuali perluasan pengaruhnya ke ranah internasional. Bagi dunia internasional, Korsel merupakan negara yang tengah mengalami peningkatan *power*, karena selain berpartisipasi dalam keamanan internasional, Korsel juga mendapat kesempatan untuk memperluas ekonominya, paling tidak untuk meningkatkan kedudukan internasionalnya.¹⁹³ Hal tersebut didukung pula dengan kedekatan letak geografis kedua negara. Oleh karena itu, Tiongkok membutuhkan situasi hubungan yang stabil dalam lingkungan regionalnya.

Dalam hal ini, Tiongkok tidak menyetujui THAAD karena dirasa akan membangkitkan *arm race* dalam lingkungan regional. Hal ini diungkapkan oleh Wang Qun sebagai *Director-General of Arms Control Departement in China's Ministry of Foreign Affairs* dalam pidatonya kepada UN.¹⁹⁴ Oleh karena itu hal ini memicu Tiongkok untuk memilih keputusan lain, karena beranggapan dengan militer akan membahayakan stabilitas keamanan regional, dan menimbulkan *arm race*. Maka dari itu, indikator keterkaitan geografis mendukung international context sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan pada tahun 2016-2017. Hal tersebut juga dilaksanakan untuk menjaga keamanan regional dengan menuntut Korsel untuk mengikuti kepentingan nasionalnya.

¹⁹³ David Shim dan Patrick Flamm. "Rising South Korea: Minor Player or Regional Power?" dalam GIGA Working papers juli 2012. Diakses melalui: https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp200_shim-flamm.pdf

¹⁹⁴ Loc.cit Ethan Meick. Hlm: 6

5.3.2 Hubungan ekonomi

Pada variabel ini, penulis akan menjelaskan mengenai hubungan ekonomi Tiongkok dengan negara lain, apakah baik atau tidak. Darisitu kemudian kita dapat mengetahui kemungkinan adanya cadangan pemasukan. Hal itu dapat dilihat dari seberapa besar keterbukaan Tiongkok dalam perdagangan internasional, yang berakibat dengan banyaknya kerjasama ekonomi dengan negara lain. Keterbukaan perdagangan Tiongkok terhadap perdagangan internasional dapat diukur melalui *trade openness index*. Yang mana semakin besar rasio keterbukaan perdagangan sebuah negara terhadap perdagangan internasional, maka negara tersebut cenderung akan semakin ketergantungan terhadap perdagangan dan finansial internasional.¹⁹⁵

Dan pada tahun 2015 *trade openness index* Tiongkok tercatat mencapai 40,46%,¹⁹⁶ yang berarti kecenderungan Tiongkok untuk membuka perdagangannya secara internasional tidak terlalu besar. Rasio tersebut pun turun pada tahun 2017, sejumlah 1,8%.¹⁹⁷ Rasio *trade openness index* Tiongkok tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan Korsel yang mencapai 84,11%. Dari rasio *trade openness index* tersebut kita juga dapat mendapatkan fakta, bahwa dengan rasio yang kecil kemungkinan negara tidak memiliki ketergantungan terhadap perdagangan dan finansial internasional, akan semakin besar.

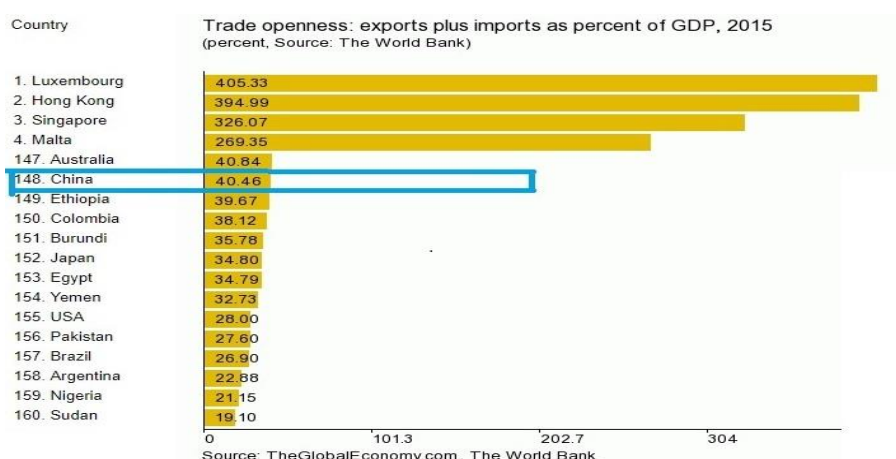
¹⁹⁵ David Berthier, Brieuc Monfort, dan Anne-Marie Stoliaroff-Pépin. In 2017, the trade openness ratio of the global economy would appear to be recovering at last. Diakses melalui: [file:///C:/Users/deiriandira/Downloads/062017_d1E%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/deiriandira/Downloads/062017_d1E%20(1).pdf)

¹⁹⁶ The Global Economy. China Trade Openness [online] diakses melalui:

https://www.theglobaleconomy.com/China/trade_openness/

¹⁹⁷ Loc. cit. David Berthier, Brieuc Monfort, dan Anne-Marie Stoliaroff-Pépin. Hlm: 30.

Gambar 13: Ranking Tiongkok pada *Trade Openness index*¹⁹⁸



Dalam gambar tersebut bisa kita lihat bahwa Tiongkok memiliki *trade openness index* yang cenderung kecil dibanding negara-negara lain didunia, yang menempati peringkat ke 148 dari 200 negara. *Trade openness index* merupakan takaran yang digunakan untuk melihat apakah negara tersebut terbuka terhadap perdagangan dunia, sehingga ada kesempatan bagi negara lain untuk membuka peluang kegiatan ekonomi di negara tersebut.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Tiongkok termasuk ke dalam negara pengekspor-impor yang terbesar didunia. Hal tersebut membuktikan bahwa perekonomian Tiongkok tidak bergantung pada hasil transaksi ekonomi internasional. Namun seperti yang dikatakan oleh Coplin tidak ada negara yang 100% memenuhi kebutuhannya sendiri, hal ini dikarenakan letak geografis, ekonomi dan sosial budaya dengan negara lain, sehingga warga negara memiliki hasrat lain untuk memiliki barang dan jasa dari wilayah lain.¹⁹⁹ Oleh karena itu negara berhubungan baik dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan ekonominya.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Loc,cit William D. Coplin. Hlm: 128

AS merupakan *trading partner* terbesar bagi Tiongkok, yang pada tahun 2017, mencapai 19% dari total ekspor Tiongkok keseluruh dunia.²⁰⁰ Tiongkok juga merupakan importer terbesar bagi AS yang pada tahun 2016, jumlah nilai impornya mencapai 436 miliar USD.²⁰¹ Sedangkan bagi Tiongkok AS merupakan negara destinasi terbesar untuk ekspor Tiongkok dengan total ekspor 400 miliar USD. Dan untuk impor Korea selatan menduduki posisi pertama sebagai negara pemasok bagi Tiongkok. Dalam kebutuhan impor, Korsel memasok sebagian besar pasokan *capital goods* bagi Tiongkok sebesar 120.25 miliar USD.²⁰² Pasokan terbesar kebutuhan impor Tiongkok berasal dari Korsel.

Tabel 4: ekspor – impor Tiongkok tahun 2015²⁰³

Partner Name	Export (US\$ Thousand)	Partner Name	Import (US\$ Thousand)
United States	409,979,244.39	Korea, Rep.	174,506,082.80
Hong Kong, China	330,462,787.18	United States	148,693,056.21
Japan	135,616,442.61	China	143,369,308.74
Korea, Rep.	101,286,384.15	Other Asia, nes	143,204,214.97
Germany	69,154,833.61	Japan	142,902,572.98
Vietnam	66,017,019.78	Germany	87,623,361.07
United Kingdom	59,567,065.46	Australia	73,509,970.81
Netherlands	59,453,380.17	Malaysia	53,277,330.69
India	58,228,027.09	Brazil	44,089,358.06
Singapore	51,942,439.61	Switzerland	41,200,165.57

Sedangkan jika dibandingkan dengan Korsel, Tiongkok menjadi negara destinasi terbesar untuk kegiatan ekspor – impornya. Total trade balance yang diperoleh Korsel dari hasil ekspor – impor dengan Tiongkok adalah surplus 593

²⁰⁰ Daniel Workman. “china’s top trading partner”. Diakses melalui: <http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/>

²⁰¹ OEC. United States: import. Diakses melalui: <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/>

²⁰² Ibid.

²⁰³ World bank. “china export-import 2015” [online]. diakses melalui: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2015/TradeFlow/Import/Partner/by-country> dan <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/by-country>

milliar USD pada tahun 2015.²⁰⁴ Dan angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan trade balance yang didapat Tiongkok dari hasil ekspor-impornya dengan Korsel. Berikut adalah tabel negara – engara partner ekspor-impor Korsel pada tahun 2015.

Tabel 5: ekspor – impor Korea Selatan tahun 2015²⁰⁵

Partner Name	① Export (US\$ Thousand) ▼	Partner Name	① Import (US\$ Thousand) ▼
① China	137,123,933.79	① China	90,248,764.26
① United States	70,117,307.23	① Japan	45,853,402.63
① Hong Kong, China	30,418,148.27	① United States	44,208,106.17
① Vietnam	27,770,750.38	① Germany	20,955,917.73
① Japan	25,576,459.43	① Saudi Arabia	19,561,486.21
① Singapore	15,011,163.91	① Other Asia, nes	16,653,850.12
① India	12,029,586.77	① Qatar	16,474,762.26
① Other Asia, nes	12,004,263.63	① Australia	16,436,975.69
① Mexico	10,891,938.12	① Russian Federation	11,308,286.31
① Australia	10,830,214.85	① Vietnam	9,804,830.61

Jika dibandingkan dari besarnya jumlah ekspor – impor Tiongkok dan Korsel pada tahun 2015, yaitu tahun sebelum pemberlakuan sanksi ekonomi, dapat dikatakan bahwa Korsel memiliki ketergantungan yang besar terhadap perekonomiannya dengan Tiongkok. Korsel juga merupakan salah satu negara yang bergantung pada hasil perdagangan internasional, oleh karena itu hasil ekspor-impor Korsel dengan negara lain berpengaruh sangat besar terhadap kelangsungan perekonomian dalam negerinya. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kerugian yang didapat oleh Korsel setelah sanksi ekonomi Tiongkok diberlakukan.

Kerugian dapat dilihat dari berbagai bidang ekonomi dari penjualan otomotif terbesar Korsel di Tiongkok yaitu KIA dan Hyundai menurun sebesar 52% per maret

²⁰⁴ World bank. “Korea Rep. Trade balance”. [online] Diakses melalui: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KOR/Year/2015/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country>

²⁰⁵ Op,cit world bank.

2017,²⁰⁶ penutupan gerai Lotte milik Korsel yang pada akhirnya bangkrut dan Lotte memutuskan untuk menjual sahamnya kepada kepada Liqun Group dengan nilai transaksi 291,4 miliar Won (setara 272,7 juta dollar AS).²⁰⁷ Pada bidang entertainment, banyak perusahaan – perusahaan di industri entertainment yang mengalami perununan saham yang cukup signifikan. Serta merupakan aksi pertama Tiongkok untuk membatalkan kesepakatan kerjasama Sino-korea yang telah terjalin semenjak tahun 1992, kerjasama ini bernilai lebih dari 300 miliar dollar.²⁰⁸

Berdasarkan besarnya kerugian yang dialami oleh Korsel tersebut, dapat dikatakan bahwa Tiongkok sedang berusaha menyerang kelemahan Korsel, yaitu dari sifatnya yang bergantung pada perekonomian Tiongkok. Tekanan yang ditunjukkan Tiongkok kepada Korsel yang berupa sanksi ekonomi terbukti berhasil pada tindakan-tindakan sebelumnya, yaitu pada peristiwa *Kimchi war* dan *garlic war*. Karena ada sejarah keberhasilan sanksi ekonomi Tiongkok tersebut maka dengan kata lain, Tiongkok telah menemukan kelemahan Korsel. Oleh karena itu pada kasus ini pun, Tiongkok kembali menyerang kelemahan Korsel yang menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan internasional dengan Tiongkok. Maka dari itu, indikator ini berpengaruh dan memberikan jawaban mengenai Tiongkok yang lebih memilih menggunakan sanksi ekonomi sebagai tindakan untuk merespon ketidaksetujuannya terhadap pengembangan sistem THAAD di Korea Selatan.

²⁰⁶ Coco Feng and An Limin. 2017. "South Korea, China Businesses Can't Find Cover in Spat Over Missile Defense". Diakses melalui: <https://www.caixinglobal.com/2017-04-05/101074620.html>

²⁰⁷ Didik Trio. "Giliran Lotte Ambruk, Jual 50 Gerai Lotte Mart dan Lepas 100 Persen Saham di China" [online] dalam Tribunnews. Diakses melalui: <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/13/giliran-lotte-ambruk-jual-50-gerai-lotte-mart-dan-lepas-100-persen-saham-di-china>

²⁰⁸ Loc, cit Ethan meick.

5.3.3 Hubungan Politik

Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan penting dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara.²⁰⁹ Dalam hal ini adalah hubungan politik Tiongkok dengan negara lainnya pada tahun 2013-2016, pada masa kepemimpinan Xi Jinping dimana keputusan sanksi ekonomi dilaksanakan. Hal tersebut juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel pada tahun 2016-2017.

Pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan percaya diri dibawah kepemimpinan Xi Jinping telah banyak tercermin dalam sejumlah inisiatif konkret yang bertujuan untuk membentuk lingkungan eksternal Tiongkok.²¹⁰ Salah satu upaya mewujudkan politik proaktif tersebut tertera dalam politik inisiatifnya, Xi Jinping menerapkan dua konsep yaitu “*community of common destiny*” yang telah dijelaskan oleh penulis pada faktor *decision making behaviour*, dan “*new type of great power relationship*”.²¹¹ Pada Juni 2013, dalam pertemuannya dengan Obama, Xi Jinping menawarkan konsep tersebut sebagai dasar dari hubungan bilateral kedua negara. Konsep tersebut dikemukakan untuk menempatkan hubungan kedua negara pada jalurnya dan sebagai upaya untuk mengelola hubungan antara Tiongkok dan AS yang kompleks dalam Sino-AS. “*new type of great power relationship*” ditentukan kedalam 3 fitur penting yaitu: (1) *non-conflict dan non-confrontation*; (2) *mutual respect*; (3) *win-win cooperation*.²¹²

Hubungan politik Tiongkok juga dikembangkan melalui *One Belt One Road* (OBOR), yang merupakan sistem perekonomian baru yang dibuat oleh Tiongkok

²⁰⁹ Loc.cit. William D. Coplin. hlm: 167

²¹⁰ Loc. cit Jian Zhang. Hlm: 13

²¹¹ Ibid. Hlm: 14

²¹² Ibid. Hlm: 14.

dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan hubungan diplomatiknya dengan negara lain. Sistem ini juga dikenal sebagai model baru dari *Silk Road* atau jalur sutra, yang dapat menghubungkan kawasan-kawasan yang terdekat dengan Tiongkok dengan melibatkan 60 negara.²¹³ Hubungan politik yang dapat dikembangkan melalui OBOR yaitu melalui dua koneksi yang lebih cenderung kepada strategi alami yaitu “*policy communication*” (*zhengce goutong*) dan “*connecting people’s mind*” (*minxin xiangtong*).²¹⁴ Strategi OBOR merupakan pengembangan dari pemikiran yang dikemukakan oleh Mao Zedong dalam strategi militernya, yaitu “*when the enemy advance, we retreat; and when the enemy retreat we pursue*” (*dijin wotui, ditui wozhui*).²¹⁵

Sementara itu di wilayah regional, Tiongkok dan Korsel telah membangun hubungan bilateral aktif dalam pertukaran diplomatik, persuasi militer dan kerjasama perdamaian di peninsula.²¹⁶ Tiongkok memiliki peranan yang penting yaitu menjadi negara mediator antara Korea Utara dan Selatan. Tiongkok memiliki posisi yang vital sebagai mediator antara kedua negara tersebut untuk dapat berdamai, hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.²¹⁷ Usaha mendamaikan kedua negara tersebut ditempuh Tiongkok melalui *Six-party Talks* sebagai salah satu upayanya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi suatu tindakan yang

²¹³ Xiaoyu Pu. “*One Belt, One Road: Visions and Challenges of China’s Geoeconomic Strategies*”. University of Nevada: Political Science Departement. Diakses melalui: <https://www.researchgate.net/publication/312533416>

²¹⁴ Ibid. Hlm: 115

²¹⁵ Ibid. Hlm: 115

²¹⁶ Laura Renner. 2006 “*The Growing Relations Between South Korea and China: Consequences for North Korea*”. Dalam Thesis Naval Postgraduate. Monterey, California. Hlm: 26

²¹⁷ Anonim. “*Six-Party Talks*.” Dalam *Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes Center for Nonproliferation Studies*. Diakses melalui: http://www.nti.org/media/pdfs/6ptalks.pdf?_=1316553863&_=1316553863

dapat membawa keamanan dan stabilitas di Korean Peninsula, yang sebagian besar pembicaraan dialamatkan pada program senjata nuklir Korut.²¹⁸

Pertemuan *Six-Party talks* tersebut pertama kali diinisiasikan pada 27 Agustus 2003, dan sempat terhenti selama 18 bulan akibat kecurigaan AS pada Korut atas penggelapan uang.²¹⁹ Namun pada Februari 2007, berkat usaha dari Tiongkok pertemuan ini diadakan kembali. Tiongkok berperan untuk membujuk Korut untuk kembali dalam kerangka multilateral setelah krisis nuklir muncul, proses memperoleh momentum tersebut terjadi pada paruh kedua tahun 2007, yang mengarah kepada menerima kesepakatan Korut untuk mematikan reaktor dan pembangkit nuklir lainnya di Yongbyon serta membuang ribuan batang bahan bakar dengan pengarahan dari AS.²²⁰

Tiongkok merupakan negara yang berperan penting pada perdamaian kedua negara tersebut dalam, karena pada masa ini hanya Tiongkok negara satu-satunya didunia yang setidaknya masih didengar oleh pemerintah Korea Utara.²²¹ Tidak ada negara yang dapat memberikan pengaruh kepada kedua negara AS dan Korut sebagaimana Tiongkok, yang memainkan peranan krusial dalam mengembangkan dan membangun mekanisme pembicaraan ke-6 negara.²²² Oleh karena itu peranan Tiongkok sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Asia Timur sangat besar.

Peranan Tiongkok sebagai mediator terus berlangsung hingga saat ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa peran Tiongkok sangat berpengaruh bagi perdamaian di

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Moosung Lee. *"The EU and the Six-Party Talks"*. Istituto Affari Internazionali. Diakses melalui: <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwpl709.pdf>

²²⁰ Ibid.

²²¹ Konstantin Fyodorovich Lykov, dkk. *"Chinese and Korean Researchers on Diplomatic Mediation of China in the North Korea Nuclear Issue"*. Dalam *Indian Journal of Science and Technology*, Vol. 9(20). Hlm: 2

²²² Ibid.

Korean Peninsula. Seperti yang telah dijelaskan oleh Director-General of Arms Control Department in China's Ministry of Foreign Affairs pada pidatonya kepada UN, bahwa keberadaan THAAD dapat menimbulkan arms race diantara dua negara Korsel dan Korut, maka posisi Tiongkok sebagai mediator sangat jelas. Oleh karena itu, Tiongkok menunjukkan protes ketidak-setujuannya kepada Korsel untuk mengembangkan sistem THAAD dengan tindakan memberikan sanksi ekonomi. Namun walaupun demikian, indikator ini tidak dapat menunjukkan bahwa hubungan politik Tiongkok dengan negara Korsel dan Korut hingga AS menjawab pertanyaan mengapa Tiongkok lebih memilih sanksi ekonomi sebagai tindakan ketidak-setujuannya.

Oleh karena itu indikator hubungan politik ini tidak memberikan pengaruh kepada Tiongkok untuk mengambil keputusan memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel pada tahun 2016-2017. Indikator ini hanya memberikan penjelasan mengenai alasan Tiongkok untuk tidak setuju kepada pengembangan sistem THAAD di wilayah Korsel, namun tidak menjelaskan mengenai tindakan Tiongkok yang lebih memilih menggunakan sanksi ekonomi sebagai ekspresi atas ketidaksetujuannya tersebut. Sehingga indikator ini tidak mendukung international context sebagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 2016-2017.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari latar belakang, teori dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Tiongkok dalam memberikan keputusan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan pada tahun 2016-2017. Faktor – faktor tersebut didapat berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh William D. Coplin dalam teori pengambilan keputusan, yang kemudian penulis elaborasikan dengan kasus. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka faktor yang mempengaruhi Keputusan sanksi ekonomi Tiongkok kepada Korsel adalah faktor *decision maker*, yang didukung oleh pengaruh seorang pengambil keputusan.

Dari pembahasan dan data yang tersedia menjawab pertanyaan penulis yang mempertanyakan faktor apa yang mempengaruhi Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 2016-2017. Dan faktor *decision maker* tersebut terbukti memberikan pengaruh kepada keputusan Tiongkok memberikan sanksi ekonomi kepada Korsel tahun 2016-2017. Dalam faktor ini dijelaskan bahwa Xi Jinping sebagai seorang pemimpin negara yang mengambil keputusan memiliki pola pengambilan keputusan tersendiri. Dalam pola kepemimpinan Xi Jinping, ia lebih cenderung mengambil keputusan dari sisi ekonomi. Maka kebanyakan dari tindakan luar negerinya akan lebih cenderung kepada bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pengaruh pola Xi Jinping sebagai pengambil keputusan yang memiliki kuasa *Ultimate Decision*, sangat besar dalam setiap pengambilan keputusan luar negeri termasuk dalam kasus ini.

Pola kepemimpinan Xi Jinping yang cenderung melihat dari sisi ekonomi membawa keputusan Tiongkok untuk lebih memilih sanksi ekonomi ketimbang tindakan yang lain,

untuk merespon pengembangan THAAD di Korsel tersebut. Tindakan luar negeri yang menggunakan ekonomi juga dapat dilihat dari sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok kepada Korea Utara untuk merespon pengembangan nuklir. Selain itu juga dari banyaknya perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok yang lebih cenderung untuk mengembangkan perekonomian internasionalnya, ketimbang kebijakan luar negeri dibidang yang lain.

Dari latar belakang masalah hingga pembahasan, maka teori yang dikemukakan oleh Coplin mengeneai pengambilan keputusan sangat relevan dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Coplin dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Dan tentu saja pendapat Coplin akan relevan jika diterapkan dalam penelitian yang serupa dalam penelitian-penelitian berikutnya.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Teori yang kemukakan oleh Coplin sangatlah luas, peneliti harus sepenuhnya memahami konteks dan cara pengoperasionalisasinya dalam kasus.
2. Negara memiliki karakter dan perilaku kebijakan yang berbeda-beda, oleh karena itu peneliti juga harus memahami perilaku pemerintahan secara detail dari berbagai aspek dan situasi.
3. Kelengkapan data sangat dibutuhkan dalam penelitian jenis ini, penulis menyarankan untuk mencari data yang relevan sebanyak-banyaknya dari sumber yang terpercaya.
4. Rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana Tiongkok membujuk pemerintah Korsel setelah masa pemerintahan Presiden Park

Geun-Hye diturunkan dari jabatannya untuk menghentikan pengembangan sistem THAAD.

5. Peneliti selanjutnya juga dapat membahas mengenai respon yang dilakukan Korsel kepada Tiongkok mengenai sanksi ekonomi yang telah diberikan kepadanya.
6. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tipe sanksi yang diberikan Tiongkok kepada negara-negara lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL:

- Alexandra Sakaki and Gudrun Wacker. 2017. *“China-Japan- South Korea: A Tense Ménage à Trois”* dalam SWP Research Paper. German Institute for International and Security Affairs: Berlin.
- Andrew S. Erickson. “China’s 2013 military budget to Rise 10.7% to US \$114.3 Billion—What it Means, and Why it Matters”. Diakses melalui: <http://www.andrewerickson.com/2013/03/chinas-2013-military-budget-what-it-means-and-why-it-matters/>
- Anthony H. Cordesman dan Joseph Kendall. 2016. “2015 white paper defense dalam CSIS: Chinese Strategy and Military Modernization in 2016”. Center for Strategic and International Studies.
- Daniel L. Byman dan Roger Cliff. 1999. “China’s arms sales: motivation and implication”. Rand: United States.
- Defense Intelligence Agency. 1984. *“Handbook of The Chinese People’s Liberation Army”*. Departement of Defence Intelligence: Washington DC
- David Shim dan Patrick Flamm. “Rising South Korea: Minor Player or Regional Power?” dalam GIGA Working papers juli 2012. Diakses melalui: https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp200_shim-flamm.pdf
- David Zweig dan Chen Zhimin. 2007. *“how china responds to trade sanctions: decoding to the Sino-South Korea ‘Garlic War’”* dalam *China reforms and International Political Economy*. Routledge: New York.
- EastAsia Forum: Jeffrey J. Schott dan Euijin Jung. 2016. *“South Korea–China FTA falls short on reform”*. Diakses melalui: <http://www.eastasiaforum.org/2016/05/29/south-korea-china-fta-falls-short-on-reform/>
- Fleurant, Aude, dkk. 2017. *“Trends in International arms transfer, 2015”*. Sipri Factsheet: Februari 2016
- Heungkyu Kim. *“Evolving China’s Foreign Policy in Northeast Asia under Hu Jintao’s Leadership and Implications to Korea-China Relations”* dalam Paper presentation at a Center for US-Korea Policy Workshop. Institute of Foreign Affairs and National Security. South Korea.
- Institute for Security and Development policy. 2016. *“THAAD in the Korean Peninsula”*. Diakses melalui: <http://isd.eu/content/uploads/2016/11/THAAD-Backgroundunder-ISDP-2.pdf>.

- Iis Gindarsah. 2012. *"Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue 2007-2008"*. S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University: Singapore.
- Jun, Hannah. 2017. *"Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea's Soft Power Success and China's Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment"*. Asian International Studies Review Vol. 18 No.1 (Juni 2017): 153-169
- Linda Jakobson dan Ryan Manuel. 2016. *"How are Foreign Policy Decisions Made in China?"*. Asia and The Pacific Policy Studies, vol. 3, no. 1, pp. 101-110.
- Laura Renner. 2006. *"the growing relations between South Korea and China: Consequences for North Korea"* dalam Thesis naval postgraduate. Monterey: California.
- Lee, Moosung. *"The EU and the Six-Party Talks"*. Istituto Affari Internazionali. Diakses melalui: <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwpl709.pdf>
- Nathan Beauchamp-Mustafaga dan Jenny Jun. 2013. *"Getting China to Enforce Sanctions on North Korea"*. Yonsei Journal of International Studies.
- Meneggazi, Silvia. 2017. *"China's Foreign Policy in Northeast Asia: Implications for the Korean Peninsula"*. AI WORKING PAPERS 17 | 03 - JANUARY 2017.
- Perlo-Freeman, Sam, dkk. 2016. *"trends in world military expenditure, 2015"*. Sipri Factsheet April 2016.
- Robert D. Blackwill dan Kurt M. Campbell. 2016. *"Xi Jinping on the Global Stage"*. Council of Foreign Relations: Council Special Report no. 74.
- Xiaoyu Pu. *"One Belt, One Road: Visions and Challenges of China's Geoeconomic Strategies"*. University of Nevada: Political Science Departement. Diakses melalui: <https://www.researchgate.net/publication/312533416>
- Zhang, Jian. 2015. *"China's new foreign policy under Xi Jinping: Towards 'Peaceful Rise 2.0'?"* dalam Global Change, Peace and Security 2015 vol. 27, no. 1, 5-19. University of New South Wales: Canberra, Australia.
- Zhou Shengqi. 2010. *"Sino-South Korea trade relations: from boom to recession"*. Dalam dalam China and the Global Economic Crisis. World Scientific Publishing: Singapore.

PEMERINTAH:

China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson's regular press conference. 2016-2017.

Transkrip dalam bahasa inggris. Diakses melalui:

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/

China's Ministry of Foreign Affairs. "*President Xi Jinping Delivers an Important Speech in ROK's Seoul National University, 4 July 2014*". Diakses melalui:

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpzxdhgjxgsfw/t1172436.shtml

Human development report. *Income Gini coefficient*. Diakses melalui:

<http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>

China's power[online]. Diakses melalui: <https://chinapower.csis.org/military-spending/>

U.S Office of the Secretary of Defense. 2016. "Annual Report to Congress: Military and Security Involving the People's Republic of China 2016".

CIA Factbook China [online]. Diakses melalui: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

China maps. Diakses melalui:

<https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/china/cnsymbols.htm#page>

"One Belt, One Road: An Economic Roadmap" dalam the Economist. The economist intellegence 2016. Diakses melalui:

<http://www.cpppc.org/u/cms/ppp/201708/15172331w9f5.pdf>

WEBSITE:

2018 Index of economic freedom. Diakses melalui:

<https://www.heritage.org/index/country/china>

Anonim. "*How China shaping the global economic order?*". [online] Diakses melalui:

<https://chinapower.csis.org/how-is-china-shaping-the-global-economic-order/>

Anonim. "china gross national product"[online]. Diakses melalui:

<https://tradingeconomics.com/china/gross-national-product>

Anonim. "China unemployment rate"[online]. Diakses melalui:

<https://www.statista.com/statistics/270320/unemployment-rate-in-china/>

Anonim. China's defences budget. Diakses melalui: [https://csis-](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf)

[prod.s3.amazonaws.com/s3fs-](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf)

[public/legacy_files/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf)

- Anonim. *"THAAD covers most major military bases but leaves out Seoul"* [online]. Diakses melalui: <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/thaad-covers-most-major-military-bases-but-leaves-out-seoul>
- BBC news. *"US anti-missile system operational in South Korea"* [online]. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/world-asia-39775854>
- BBC News. *"China Country Profile"* [online]. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877>
- BBCnews. 2017. *"North Korea's nuclear programme: How advanced is it?"*. Diakses melalui: <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699>.
- BBCnews. 2017. *"S Korea complains to WTO about China over Thaad"*. Diakses melalui: <http://www.bbc.com/news/business-39324536>.
- Chinadaily. 2016. *"Top 10 Foreign Destinations for Chinese Tourist"*. diakses melalui: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016top10/2016-08/11/content_26410430_8.htm
- Chinadaily. 2016. *"Top 10 Foreign Destinations for Chinese Tourist"*. diakses melalui: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016top10/2016-08/11/content_26410430_8.htm
- CNBC. 2017. *"Chinese media warn about 'lessons' for South Korea when it ignores Beijing's 'Concerns'"*. Diakses melalui: <https://www.cnbc.com/2017/09/19/china-warns-about-lessons-for-south-korea-when-it-ignores-beijings-concerns.html>
- Edward Wong, dkk. *"China Announces Cuts of 300.000 troops at Military Parade Showing Its Might"* [online]. Diakses melalui: <https://www.nytimes.com/2015/09/03/world/asia/beijing-turns-into-ghost-town-as-it-gears-up-for-military-parade.html>
- Gabriel Wildau dan Tom Mitchell. *"China income inequality among world's worst"* [online]. Dalam Financial Times. Diakses melalui: <https://www.ft.com/content/3c521faa-baa6-11e5-a7cc-280dfe875e28>
- Jonathan Kaiman. *"China gets richer but more unequal"* [online]. Dalam The Guardian. Diakses melalui: <https://www.theguardian.com/world/2014/jul/28/china-more-unequal-richer>
- Jean Lin. *"contaminated kimchi sparks spat"* [online]. Diakses melalui: <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2005/11/04/2003278621>
- Kamal Ehmed. *"china's debt mountain: should we worry?"* [online]. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/business-40029092>

- KatieHunt and Steven Jiang. "*China's military budget to grow at slowest pace in five years*" [online]. Diakses melalui: <https://edition.cnn.com/2016/03/04/asia/china-npc-military-budget/index.html>
- KEITH BRADSHER. 2018. "*China's growth looks strong. Maybe economic too strong.*" Dalam The Newyork Times [online] Diakses melalui: <https://www.nytimes.com/2018/01/18/business/china-gdp-economytoo-growth.html>
- Kimberly Amadeo. "*Gross National Product and its Differences from Gross Domestic Product*". Diakses melalui: <https://www.thebalance.com/what-is-the-gross-national-product-3305847>
- Kompas(dot)com. 2018. "*Inilah Momen Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan Selama 68 Tahun*". Diakses dari: <http://internasional.kompas.com/read/2018/01/09/12084661/inilah-momen-ketegangan-korea-utara-dan-korea-selatan-selama-68-tahun..>
- KBS.2016. "*S.Korea Requested Information on THAAD to Develop LSAM*". Diakses melalui: http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=103072. Pada: 3 oktober 2017
- Larry Elliot. "*China's debt is 250% of GDP and 'could be fatal', says goverment expert*" [online] diakses melalui: <https://www.theguardian.com/business/2016/jun/16/chinas-debt-is-250-of-gdp-and-could-be-fatal-says-government-expert>
- Niall McCharthy. "*The Top 15 Countries for Military Expenditure in 2016*" [Online]. Diakses melalui: <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/04/24/the-top-15-countries-for-military-expenditure-in-2016-infographic/#7da1f91f43f3>
- South China Morning Post. 2017. "*South Korea 'suspends visas' for Chinese teachers at Confucius Institutes*". Diakses melalui: <http://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2067162/south-korea-suspends-visas-chinese-teachers-confucius-institutes>
- Terrell Jermaine Starr. "*Why China's nervous over South Korea's new missile Defense System*" [online].
- The observatory of Economic Complexity. 2017. "*What does China import from South Korea?*". Diakses dari: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/kor/show/2015/
- The Hankyoreh. 2017. "*Senior Chinese official says THAAD-related ban on tours to South Korea to continue*". Diakses melalui: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/796467.html

The Hankyoreh. 2015. "*Chinese companies aggressively targeting South Korean businesses for M&As*". diakses melalui:
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/723179.html

The observatory of Economic Complexity. 2017. "*South Korea: Export Destination and Import Origin*". Diakses dari: <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/>

Zhong Sheng, "China: No interference in Syria's internal affairs,"[online] dalam People's Daily, October 13, 2011. Diakses melalui:
<http://english.peopledaily.com.cn/90780/7616513.html>.

